

## BAB V

### Kebijakan Akuntansi

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan landasan dan pedoman penyusunan laporan keuangan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan dengan penerbitan Peraturan Bupati pertama Nomor 23a Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 23a Tahun 2014 selanjutnya pada tahun 2017 diubah lagi peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menggantikan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 dan terakhir pada Tahun 2019 diterbitkan lagi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai panduan dasar penyusunan laporan keuangan Tahun 2023.

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terhitung berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun.

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP, dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:

- 1) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2) Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan;
- 3) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
- 4) Kebijakan Akuntansi Belanja;
- 5) Kebijakan Akuntansi Transfer;
- 6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- 7) Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran;
- 8) Kebijakan Akuntansi Neraca;
- 9) Kebijakan Akuntansi Piutang;
- 10) Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- 11) Kebijakan Akuntansi Investasi;
- 12) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- 13) Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
- 14) Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- 15) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- 16) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
- 17) Kebijakan Akuntansi Beban;
- 18) Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas;
- 19) Kebijakan Akuntansi LO dan LPE;
- 20) Kebijakan Akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- 21) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

#### **5.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## **5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 56 Tahun 2017, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten perlu menyajikan kembali Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## **5.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

### **5.3.1. Pengukuran Pendapatan**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

#### 5.3.1.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self-assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

#### 5.3.1.2. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

#### 5.3.2. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.



#### 5.3.2.1. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

##### 5.3.2.1.1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain.

1. Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
2. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
3. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

4. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
6. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
7. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
8. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
9. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
10. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 5.3.2.1.2. Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

1. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
2. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

## 5.3.2.1.3. Pengakuan Beban

Dalam penerapan transaksi keuangan pemerintah daerah beban diakui

1. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
2. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas



mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

1. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
2. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

1. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember pelaporan belum dibayar.
2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember pelaporan belum dibayar. Dalam hal pada tanggal pelaporan akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
3. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
4. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.



6. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui Desa yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

#### 5.3.2.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto. Berikut beberapa definisi Belanja:

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

##### 5.3.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

##### 5.3.2.2.2. Belanja pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### 5.3.2.2.3. Belanja barang dan jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

#### 5.3.2.2.4. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

#### 5.3.2.2.5. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

#### 5.3.2.2.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

#### 5.3.2.2.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

#### 5.3.2.2.8. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi jaringan (JIJ), aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

#### 5.3.2.2.9. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

#### 5.3.2.2.10. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja juga dapat diklasifikasi menjadi klasifikasi organisasi dan klasifikasi ekonomi, berikut rinciannya:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

Dalam penerapannya aktivitas belanja akan diakui jika terjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

### 5.3.3. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah.



#### 5.3.2.3. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Dalam rangka penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

#### 5.3.2.4. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Sedangkan untuk penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 5.3.4. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai setara kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### 5.3.5. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:



#### 5.3.5.1. Kas di Kasda

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di Rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

#### 5.3.5.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

#### 5.3.5.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

#### 5.3.5.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

#### 5.3.5.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

### 5.3.6. Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul

klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

#### 5.3.6.1. Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

#### 5.3.6.2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

#### 5.3.6.3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui

sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

#### 5.3.6.4. Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

#### 5.3.6.5. Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
2. Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
  - Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen); Apabila telah dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;



- Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen); Apabila dalam jangka waktu 1 bulan dalam satu tahun terhitung tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Piutang diragukan nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen); Apabila dalam jangka waktu 6 bulan dalam satu tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen); Apabila dalam jangka waktu 9 bulan dalam satu tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Tabel.5. 1  
Tabel Jenis Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

3. Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
4. Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
5. Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - b. Penghapusbukuan (*write down*) merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).



Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
  - 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- c. Penghapustagihan (*write off*) dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.
- 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
  - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
  - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
  - 5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
  - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d. Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

- e. Restrukturisasi, Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan utang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

#### 5.3.7. Pengakuan Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Persediaan dan Beban Persediaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktik bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak / usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO.

Persediaan disajikan sebesar:

##### 5.3.7.1. Biaya Perolehan

Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

##### 5.3.7.2. Harga pokok produksi

Harga Pokok Produksi diperoleh dengan memproduksi sendiri harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

#### 5.3.7.3. Nilai Wajar

Nilai Wajar diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### 5.3.8. Pengakuan Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

##### 5.3.8.1. Pengukuran Investasi:

1. Dicatat sebesar nilai perolehan investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - a. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
  - b. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

2. Dicatat sebesar nilai wajar untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
  - a. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



- b. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
3. Dicatat sebesar nilai nominal investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
4. Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
5. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

#### 5.3.8.2. Penilaian Investasi Pemerintah daerah

##### 1. Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

##### 2. Metode Ekuitas,

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

##### 3. Metode Nilai Bersih

Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana



bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

#### 5.3.9. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Kapitalisasi aset adalah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan awal aset tetap per unitnya sebagai berikut:

1. Peralatan dan mesin minimum sebesar Rp500.000,00, kecuali Rambu-Rambu minimum sebesar Rp30.000.000,00 dan Peralatan Olahraga minimum sebesar Rp300.000,00.
2. Gedung dan bangunan minimum sebesar Rp30.000.000,00.

3. Jalan, jaringan, irigasi minimum sebesar Rp30.000.000,00, kecuali Jaringan Listrik dan Telepon minimum sebesar Rp3.000.000,00.
4. Aset tetap lainnya minimum sebesar Rp300.000,00, kecuali Hewan minimum sebesar Rp500.000 dan Aset Tetap Renovasi minimum Rp.30.000.000,00

#### 5.3.9.1. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran +1.

#### 5.3.9.2. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.



#### 5.3.9.3. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.

3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- c. Bangun Guna Serah/BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- d. Bangun Serah Guna/BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

#### 5.3.9.4. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa peranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

#### 5.3.9.5. Aset Lain-Lain

Aset Lain – Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### 5.3.10. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah Kewajiban diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

##### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

##### 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.



### 5.3.11. Pengukuran Ekuitas

Dalam pengelolaan keuangan daerah Ekuitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu:

#### 1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

#### 2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

#### 3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat (*reciprocal account*) untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

## 5.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

### 5.4.1. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 5.4.1.1. Kesalahan tidak Berulang

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan

pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

#### 5.4.1.2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB VI

Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

6.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat di uraikan sebagai berikut:

6.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pada Tahun Anggaran 2023 Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebesar Rp545.196.618.255,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp538.464.281.623,51 atau sebesar 98,77% dari target anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 terjadi kenaikan realisasi sebesar 1,28% atau sebesar Rp6.812.628.939,51. Berikut di sajikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 1  
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
PENDAPATAN DAERAH	545.196.618.255,00	538.464.281.623,51	98,77	531.651.652.684,00	6.812.628.939,51	1,28

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Dari ke tiga jenis pendapatan diatas pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan realisasi sebesar Rp515.246.046.482,00 dengan total kontribusi sebesar 95,69% dari total Pendapatan Daerah selanjutnya di susul oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp19.289.568.832,51 dengan total kontribusi sebesar 3,58% dan yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp3.928.666.309,00 dengan total kontribusi sebesar 0,73%.

Berdasarkan realisasi masing-masing pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, terdapat kenaikan dan penurunan pendapatan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 2  
Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pendapatan Daerah		545.196.618.255,00	538.464.281.623,51	98,77	531.651.652.684,00	6.812.628.939,51	1,28
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.484.396.522,00	19.289.568.832,51	124,57	12.890.096.650,00	6.399.472.182,51	49,65
2	PENDAPATAN TRANSFER	525.575.437.193,00	515.246.046.482,00	98,03	505.854.623.787,00	9.391.422.695,00	1,86
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.136.784.540,00	3.928.666.309,00	94,97	12.906.932.247,00	-8.978.265.938,00	-69,56

6.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp19.289.568.832,51, atau mencapai 124,57% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp15.484.396.522,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 49,65%. Jika dilihat dari total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyerap 3,58% dari total Pendapatan Daerah. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 3  
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH		15.484.396.522,00	19.289.568.832,51	124,57	12.890.096.650,00	6.399.472.182,51	49,65
1	Pendapatan Pajak Daerah	10.710.546.270,00	12.222.265.134,00	114,11	7.804.348.931,00	4.417.916.203,00	56,61
2	Pendapatan Retribusi Daerah	839.804.100,00	1.299.220.740,00	154,71	397.832.320,00	901.388.420,00	226,57
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.409.788.093,00	1.409.788.093,00	100,00	948.010.307,00	461.777.786,00	48,71
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.524.258.059,00	4.358.294.865,51	172,66	3.739.905.092,00	618.389.773,51	16,53

6.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Pajak Daerah - LRA adalah pajak daerah yang telah dipungut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp12.222.265.134,00, atau mencapai 114,11% dari anggaran Pajak Daerah yang ditetapkan sebesar Rp10.710.546.270,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 56,61%. Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Daerah menyerap 63,36% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 4  
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pajak Daerah		10.710.546.270,00	12.222.265.134,00	114,11	7.804.348.931,00	4.417.916.203,00	56,61
1	Pajak Hotel	35.000.000,00	36.752.000,00	105,01	35.106.250,00	1.645.750,00	4,69
2	Pajak Restoran	550.000.000,00	769.052.529,00	139,83	688.913.157,00	80.139.372,00	11,63

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
3	Pajak Hiburan	22.500.000,00	11.100.000,00	49,33	22.950.000,00	(11.850.000,00)	(51,63)
4	Pajak Reklame	202.500.000,00	206.894.625,00	102,17	211.332.875,00	(4.438.250,00)	(2,10)
5	Pajak Penerangan Jalan	2.159.356.906,00	2.778.464.543,00	128,67	2.078.981.260,00	699.483.283,00	33,65
6	Pajak Sarang Burung Walet	10.250.000,00	10.145.000,00	98,98	10.600.000,00	(455.000,00)	(4,29)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	650.000.000,00	876.693.847,00	134,88	320.172.910,00	556.520.937,00	173,82
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.350.000.000,00	2.399.000.729,00	102,09	2.401.143.531,00	(2.142.802,00)	(0,09)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.730.939.364,00	5.134.161.861,00	108,52	2.035.148.948,00	3.099.012.913,00	152,27

Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah hingga 114,11% dari target anggaran Pajak Daerah Tahun 2023 dipengaruhi meredanya Pandemi Covid-19, sehingga objek – objek Pendapatan Daerah yang menjadi sumber – sumber pendapatan Daerah mulai beroperasi sebagai mana mestinya, disisi lain dampak Pandemi Covid-19 ini juga berimbas pada objek pendapatan yang berhubungan dengan aktifitas masyarakat dimana sektor – sektor tersebut butuh sosialisasi masyarakat secara terus menerus tentang pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 agar masyarakat bisa beraktivitas seperti sebelumnya dan hal tersebut tentu akan berdampak pada objek – objek pajak yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat.

Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan bersumber dari prosedur pemungutan Pajak Daerah yang merupakan komponen Pajak Daerah yang bersumber dari Wajib Pajak.

1. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp36.752.000,00, atau mencapai 105,01% dari anggaran Pajak Hotel yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar 4,69%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Hotel menyerap 0,30% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 5  
Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenalkan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pajak Hotel		35.000.000,00	36.752.000,00	105,01	35.106.250,00	1.645.750,00	4,69
1	Pajak Hotel	35.000.000,00	36.752.000,00	105,01	35.106.250,00	1.645.750,00	4,69

2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp769.052.529,00, atau mencapai 139,83% dari anggaran Pajak Restoran yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar 11,63%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Restoran menyerap 6,29% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 6  
Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pajak Restoran		550.000.000,00	769.052.529,00	139,83	688.913.157,00	80.139.372,00	11,63
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	550.000.000,00	769.052.529,00	139,83	688.913.157,00	80.139.372,00	11,63

3. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp11.100.000,00, atau mencapai 49,33% dari anggaran Pajak Hiburan yang ditetapkan sebesar Rp22.500.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Hiburan mengalami penurunan sebesar 51,63%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Hiburan menyerap 0,09% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 7  
Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pajak Hiburan		22.500.000,00	11.100.000,00	49,33	22.950.000,00	(11.850.000,00)	(51,63)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	22.500.000,00	11.100.000,00	49,33	22.950.000,00	(11.850.000,00)	(51,63)

4. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp206.894.625,00, atau mencapai 102,17% dari anggaran Pajak Reklame yang ditetapkan sebesar Rp202.500.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar 2,10%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Reklame menyerap 1,69% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 8  
Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pajak Reklame		202.500.000,00	206.894.625,00	102,17	211.332.875,00	(4.438.250,00)	(2,10)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	202.500.000,00	206.894.625,00	102,17	211.332.875,00	(4.438.250,00)	(2,10)

5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.778.464.543,00, atau mencapai 128,67% dari anggaran Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebesar Rp2.159.356.906,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan sebesar 33,65%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Penerangan Jalan menyerap 22,73% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 9  
Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Pajak Penerangan Jalan	2.159.356.906,00	2.778.464.543,00	128,67	2.078.981.260,00	699.483.283,00	33,65
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.159.356.906,00	2.778.464.543,00	128,67	2.078.981.260,00	699.483.283,00	33,65

6. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.145.000,00, atau mencapai 98,98% dari anggaran Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan sebesar Rp10.250.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Sarang Burung Walet mengalami penurunan sebesar 4,29%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Sarang Burung Walet menyerap 0,08% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 10  
Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Pajak Sarang Burung Walet	10.250.000,00	10.145.000,00	98,98	10.600.000,00	(455.000,00)	(4,29)
1	Pajak Sarang Burung Walet	10.250.000,00	10.145.000,00	98,98	10.600.000,00	(455.000,00)	(4,29)

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp876.693.847,00, atau mencapai 134,88% dari anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan sebesar 173,82%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyerap 7,17% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 11  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya		650.000.000,00	876.693.847,00	134,88	320.172.910,00	556.520.937,00	173,82
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	650.000.000,00	876.693.847,00	134,88	320.172.910,00	556.520.937,00	173,82

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 yang mencapai 134,88%, dikarenakan di Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menentukan Harga Satuan masih menggunakan Harga Satuan lama sampai dengan tanggal 9 November 2022 sehingga dalam perhitungan Pajak yang diperoleh telah maksimal. Disisi lain kenaikan yang signifikan jika di bandingkan dengan Tahun sebelumnya dimana kenaikannya mencapai 173,82% berikut beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut :

- Meningkatnya Proyek Pekerjaan Fisik di Tahun 2023
- Menurunnya Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Tahun 2023 sehingga berpengaruh terhadap persentase realisasi dibanding Tahun sebelumnya.
- Pemberlakuan SK Gubernur Nomor 377 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Jual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Sulawesi Utara sejak tanggal 9 November 2022.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.399.000.729,00, atau mencapai 102,09% dari anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang ditetapkan sebesar Rp2.350.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mengalami penurunan sebesar 0,09%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) menyerap 19,63% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 12

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)		2.350.000.000,00	2.399.000.729,00	102,09	2.401.143.531,00	(2.142.802,00)	(0,09)
1	PBBP2	2.350.000.000,00	2.399.000.729,00	102,09	2.401.143.531,00	(2.142.802,00)	(0.09)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 yang mencapai 102,09%, dikarenakan di Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menurunkan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.134.161.861,00, atau mencapai 108,52% dari anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan sebesar Rp4.730.939.364,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami kenaikan sebesar 152,27%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyerap 42,01% dari total Pajak Daerah. Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 13

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		4.730.939.364,00	5.134.161.861,00	108,52	2.035.148.948,00	3.099.012.913,00	152,27
1	BPHTB-Pemindahan Hak	4.730.939.364,00	5.134.161.861,00	108,52	2.035.148.948,00	3.099.012.913,00	152,27

Kenaikan Signifikan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 152,27%, dikarenakan Upaya

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna memaksimalkan serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Tahun 2023; dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi agar setiap transaksi jual beli tanah berupa peralihan hak atas tanah dan bangunan dilakukan secara legal;
- 2) Memberikan edukasi terkait peraturan yang mengatur tentang BPHTB dan manfaat pajak bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada wajib pajak;
- 3) Membahas bersama PPAT, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah mengenai mekanisme pemungutan biaya yang dibebankan pada pembeli atas transaksi jual beli tanah dan bangunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
- 4) Melakukan Pembahasan Bersama pihak–pihak yang terkait dengan proses pemungutan biaya yang disebabkan atas transaksi jual beli tanah dan bangunan dalam hal ini PPAT, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa yang bertujuan merumuskan besaran biaya atas transaksi jual beli tanah dan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

#### **6.1.1.1.2. Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan Retribusi Daerah adalah retribusi daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran, dan Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Minibus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum; dan



3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Parkir - Di Tepi Jalan Umum.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.299.220.740,00, atau mencapai 154,71% dari anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebesar Rp839.804.100,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 226,57%. Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan Retribusi Daerah menyerap 6,74% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 14  
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pendapatan Retribusi Daerah		839.804.100,00	1.299.220.740,00	154,71	397.832.320,00	901.388.420,00	226,57
1	Retribusi Jasa Umum	284.804.100,00	1.212.662.440,00	425,79	224.635.270,00	988.027.170,00	439,84
2	Retribusi Jasa Usaha	55.000.000,00	35.383.000,00	64,33	45.561.000,00	(10.178.000,00)	(22,34)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	51.175.300,00	10,24	127.636.050,00	(76.460.750,00)	(59,91)

Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan bersumber dari prosedur pemungutan Retribusi Daerah yang merupakan komponen Retribusi Daerah yang bersumber dari Wajib Pajak.

1. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.212.662.440,00, atau mencapai 425,79% dari anggaran Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan sebesar Rp284.804.100,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan sebesar 439,84%. Jika dilihat dari total Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Retribusi Jasa Umum menyerap 93,34% dari total Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 15  
Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Retribusi Jasa Umum		284.804.100,00	1.212.662.440,00	425,79	224.635.270,00	988.027.170,00	439,84
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	154.804.100,00	1.129.678.440,00	729,75	157.704.770,00	971.973.670,00	616,32
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	17.778.000,00	59,26	15.761.000,00	2.017.000,00	12,80
3	Retribusi Pelayanan Pasar	100.000.000,00	65.206.000,00	65,21	51.169.500,00	14.036.500,00	27,43

Kontribusi Kenaikan realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi pada kelompok Retribusi Jasa Umum di sumbangkan oleh pendapatan retribusi pada kategori Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mencapai 729,75% dari target yang ditetapkan. Kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya penerimaan CPNS dan P3K tahun 2023 yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan memperoleh surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp35.383.000,00, atau mencapai 64,33% dari anggaran Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan sebesar Rp55.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar 22,34%. Jika dilihat dari total Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Retribusi Jasa Usaha menyerap 2,72% dari total Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 16  
Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenalkan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Retribusi Jasa Usaha		55.000.000,00	35.383.000,00	64,33	45.561.000,00	(10.178.000,00)	(22,34)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	16.790.000,00	67,16	22.600.000,00	(5.810.000,00)	(25,71)
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	18.593.000,00	61,98	22.961.000,00	(4.368.000,00)	(19,02)

Penurunan Pendapatan Kelompok Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 sangat dipengaruhi oleh Resesi Ekonomi dimana keadaan situasi ekonomi yang sulit dapat membuat banyak perusahaan kesulitan keuangan, sehingga mereka mungkin tidak dapat membayar retribusi sepenuhnya atau sama sekali.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp51.175.300,00, atau mencapai 10,24% dari anggaran Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan sebesar 59,91%. Jika dilihat dari total Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Retribusi Perizinan Tertentu menyerap 3,94% dari total Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 17  
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	51.175.300,00	10,24	127.636.050,00	(76.460.750,00)	(59,91)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	51.175.300,00	10,24	127.636.050,00	(76.460.750,00)	(59,91)

Penurunan Pendapatan dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang masih stagnan akibat Covid-19, menyebabkan tingkat kemampuan masyarakat dan pengusaha melakukan pembangunan rumah maupun gedung usaha sangat rendah.
- b. Kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB pada rumah-rumah permanen yang sudah dibangun yang menurut Peraturan harus memiliki izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sangat rendah.

6.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dan tidak termasuk dalam kekayaan daerah yang menjadi milik bersama dengan pemerintah pusat atau kekayaan daerah yang dimiliki oleh masyarakat.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.409.788.093,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan sebesar Rp1.409.788.093,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 48,71%. Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menyerap 7,31% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 18  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.409.788.093,00	1.409.788.093,00	100,00	948.010.307,00	461.777.786,00	48,71
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.409.788.093,00	1.409.788.093,00	100,00	948.010.307,00	461.777.786,00	48,71

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD PT Bank SulutGo. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6.1. 19  
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		1.409.788.093,00	1.409.788.093,00	100,00	948.010.307,00	461.777.786,00	48,71
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.409.788.093,00	1.409.788.093,00	100,00	948.010.307,00	461.777.786,00	48,71

6.1.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan keuangan dari sumber-sumber lain yang sah, seperti hasil penjualan aset daerah, bunga bank, dan lain-lain.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.358.294.865,51, atau mencapai 172,66% dari anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan sebesar Rp2.524.258.059,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar 16,53%. Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Lain-lain PAD yang Sah menyerap 22,59% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 20  
Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Lain-lain PAD yang Sah		2.524.258.059,00	4.358.294.865,51	172,66	3.739.905.092,00	618.389.773,51	16,53
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	87.554.400,00	(87.554.400,00)	(100,00)
2	Jasa Giro	897.543.718,00	1.107.433.434,32	123,38	1.274.340.366,00	(166.906.931,68)	(13,10)
3	Pendapatan Bunga	260.157.675,00	375.328.271,00	144,27	767.383.611,00	(392.055.340,00)	(51,09)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.366.556.666,00	2.355.952.120,19	172,40	793.174.593,00	1.562.777.527,19	197,03
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	442.625.039,00	100,00	766.529.858,00	(323.904.819,00)	(42,26)
6	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	76.956.001,00	100,00	50.209.136,00	26.746.865,00	53,27
7	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	713.128,00	(713.128,00)	(100,00)

1. Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.107.433.434,32, atau mencapai 123,38% dari anggaran Jasa Giro yang ditetapkan sebesar Rp897.543.718,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Jasa Giro mengalami penurunan sebesar 13,10%. Jika dilihat dari total Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Jasa Giro menyerap 25,41% dari total Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 21  
Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Jasa Giro	897.543.718,00	1.107.433.434,32	123,38	1.274.340.366,00	(166.906.931,68)	(13,10)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	897.543.718,00	1.107.433.434,32	123,38	1.272.803.530,00	(165.370.095,68)	(12,99)
2	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	1.536.836,00	(1.536.836,00)	(100,00)

2. Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp375.328.271,00, Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Bunga mengalami penurunan sebesar 51,09%. Jika dilihat dari total Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan Bunga menyerap 8,61% dari total Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 22  
Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Pendapatan Bunga	260.157.675,00	375.328.271,00	144,27	767.383.611,00	(392.055.340,00)	(51,09)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	260.157.675,00	375.328.271,00	144,27	767.383.611,00	(392.055.340,00)	(51,09)

3. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.355.952.120,19, atau mencapai 172,40% dari anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp1.366.556.666,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar 197,03%. Jika dilihat dari total Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah menyerap 54,06% dari total Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 23

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		1.366.556.666,00	2.355.952.120,19	172,40	793.174.593,00	1.562.777.527,19	197,03
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	1.787.727,00	(1.787.727,00)	(100,00)
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.366.556.666,00	2.355.952.120,19	172,40	791.386.866,00	1.564.565.254,19	197,70

4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp442.625.039,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami penurunan sebesar 42,26%. Jika dilihat dari total Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan menyerap 10,16% dari total Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 24

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	442.625.039,00	100,00	766.529.858,00	(323.904.819,00)	(42,26)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	442.625.039,00	100,00	766.529.858,00	(323.904.819,00)	(42,26)

Peningkatan capaian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan di Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disebabkan Terdapat Proyek Perkerjaan Fisik yang tidak selesai tepat pada waktunya.

5. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp76.956.001,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran Pendapatan dari Pengembalian yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan dari Pengembalian mengalami kenaikan sebesar 53,27%. Jika dilihat dari total Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan dari Pengembalian menyerap 1,77% dari total Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 25

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	72.034.001,00	100,00	0,00	72.034.001,00	100,00

6.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp515.246.046.482,00, atau mencapai 98,03% dari anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan sebesar Rp525.575.437.193,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar 1,86%. Jika dilihat dari total Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan Transfer menyerap 95,69% dari total Pendapatan Daerah. Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 26  
Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
PENDAPATAN TRANSFER		525.575.437.193,00	515.246.046.482,00	98,03	505.854.623.787,00	9.391.422.695,00	1,86
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	444.164.759.750,00	433.140.764.707,00	97,52	420.549.244.023,00	12.591.520.684,00	2,99
2	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	0,00	0,00	0,00	6.220.649.000,00	(6.220.649.000,00)	(100,00)
3	DANA DESA	61.170.584.000,00	61.170.584.000,00	100,00	57.961.389.000,00	3.209.195.000,00	5,54
4	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	20.240.093.443,00	20.934.697.775,00	103,43	21.123.341.764,00	(188.643.989,00)	(0,89)

6.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer pemerintah pusat adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk membiayai program dan kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah atau lembaga tersebut. Transfer ini dilakukan dalam rangka memperkuat otonomi daerah dan memberikan dukungan keuangan kepada daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya. Transfer pemerintah pusat dapat berupa dana bagi hasil, dana perimbangan, dana alokasi khusus, dan dana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah atau lembaga penerima.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp433.140.764.707,00, atau mencapai 97,52% dari anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp444.164.759.750,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar 2,99%. Jika dilihat dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan menyerap 84,06% dari total Pendapatan Transfer. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 27  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		444.164.759.750,00	433.140.764.707,00	97,52	420.549.244.023,00	12.591.520.684,00	2,99
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.678.240.335,00	4.678.240.255,00	100,00	9.147.792.836,00	(4.469.552.581,00)	(48,86)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.907.814.415,00	8.907.814.495,00	100,00	25.609.303.235,00	(16.701.488.740,00)	(65,22)
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	339.596.203.000,00	339.595.094.790,00	100,00	324.032.723.653,00	15.562.371.137,00	4,80
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.688.982.000,00	38.113.084.315,00	81,63	37.682.369.087,00	430.715.228,00	1,14
5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	44.293.520.000,00	41.846.530.852,00	94,48	24.077.055.212,00	17.769.475.640,00	73,80

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.678.240.255,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan sebesar Rp4.678.240.335,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan sebesar 48,86%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) menyerap 1,08% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 28  
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		4.678.240.335,00	4.678.240.255,00	100,00	9.147.792.836,00	(4.469.552.581,00)	(48,86)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.680.976.026,00	1.680.975.946,00	100,00	6.464.910.190,00	(4.783.934.244,00)	(74,00)
2	DBH PPh Pasal 21	2.997.264.309,00	2.997.264.309,00	100,00	2.506.767.000,00	490.497.309,00	19,57
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	0,00	0,00	176.115.646,00	(176.115.646,00)	(100,00)



2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.907.814.495,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang ditetapkan sebesar Rp8.907.814.415,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami penurunan sebesar 65,22%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam menyerap 2,06% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 29  
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		8.907.814.415,00	8.907.814.495,00	100,00	25.609.303.235,00	(16.701.488.740,00)	(65,22)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	756.444.544,00	756.444.534,00	100,00	2.492.989.534,00	(1.736.545.000,00)	(69,66)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.275.249.694,00	6.275.249.799,00	100,00	2.691.398.393,00	3.583.851.406,00	133,16
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	18.465.698.308,00	(18.465.698.308,00)	(100,00)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.761.966,00	9.761.956,00	100,00	906.000,00	8.855.956,00	977,48
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.866.358.211,00	1.866.358.206,00	100,00	1.958.311.000,00	(91.952.794,00)	(4,70)

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp339.595.094.790,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan sebesar Rp339.596.203.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan sebesar 4,80%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) menyerap 78,40% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 30  
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		339.596.203.000,00	339.595.094.790,00	100,00	324.032.723.653,00	15.562.371.137,00	4,80
1	DAU	339.596.203.000,00	339.595.094.790,00	100,00	324.032.723.653,00	15.562.371.137,00	4,80

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp38.113.084.315,00, atau mencapai 81,63% dari anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditetapkan sebesar Rp46.688.982.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami kenaikan sebesar 1,14%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menyerap 8,80% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 31  
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		46.688.982.000,00	38.113.084.315,00	81,63	37.682.369.087,00	430.715.228,00	1,14
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	803.181.000,00	801.448.291,00	99,78	293.500.243,00	507.948.048,00	173,07
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.307.455.000,00	2.675.431.472,00	80,89	3.460.198.734,00	(784.767.262,00)	(22,68)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.488.893.000,00	1.401.015.590,00	94,10	4.716.597.786,00	(3.315.582.196,00)	(70,30)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.784.160.000,00	1.153.090.623,00	64,63	0,00	1.153.090.623,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	203.437.866,00	(203.437.866,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.130.650.765,00	(2.130.650.765,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.749.203.397,00	(2.749.203.397,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.796.675.000,00	10.081.638.776,00	148,33	0,00	10.081.638.776,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	171.328.000,00	152.349.730,00	88,92	191.972.200,00	(39.622.470,00)	(20,64)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.812.764.331,00	(1.812.764.331,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.663.015.000,00	21.662.107.425,00	100,00	9.798.702.115,00	11.863.405.310,00	121,07
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	6.853.447.650,00	(6.853.447.650,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.471.894.000,00	(5.471.894.000,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	10.674.275.000,00	186.002.408,00	1,74	0,00	186.002.408,00	100,00

5. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp41.846.530.852,00, atau mencapai 94,48% dari anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang ditetapkan sebesar Rp44.293.520.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mengalami kenaikan sebesar 73,80%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menyerap 9,66% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 32

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		44.293.520.000,00	41.846.530.852,00	94,48	24.077.055.212,00	17.769.475.640,00	73,80
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	9.779.700.000,00	9.768.801.967,00	99,89	0,00	9.768.801.967,00	100,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	817.500.000,00	817.500.000,00	100,00	0,00	817.500.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	16.585.553.000,00	15.792.117.380,00	95,22	14.642.916.980,00	1.149.200.400,00	7,85
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	529.500.000,00	499.750.000,00	94,38	625.000.000,00	(125.250.000,00)	(20,04)
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.554.750.000,00	1.520.183.550,00	97,78	579.618.000,00	940.565.550,00	162,27
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	446.630.000,00	446.630.000,00	100,00	0,00	446.630.000,00	100,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.311.377.000,00	7.746.422.900,00	179,67	5.386.810.342,00	2.359.612.558,00	43,80
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.771.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.515.323.000,00	3.656.849.361,00	145,38	1.572.722.270,00	2.084.127.091,00	132,52
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	438.200.000,00	438.008.408,00	99,96	318.487.620,00	119.520.788,00	37,53
12	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	588.612.113,00	98,43	601.800.000,00	(13.187.887,00)	(2,19)
13	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	606.075.000,00	571.655.173,00	94,32	349.700.000,00	221.955.173,00	63,47

6.1.1.2.2. Dana Desa

Realisasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 dari anggarannya ditetapkan sebesar Rp61.170.584.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 5,54%. Jika dilihat dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Dana Desa menyerap 11,87% dari total Pendapatan Transfer. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 33  
Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Dana Desa		61.170.584.000,00	61.170.584.000,00	100,00	57.961.389.000,00	3.209.195.000,00	5,54
1	Dana Desa	61.170.584.000,00	61.170.584.000,00	100,00	57.961.389.000,00	3.209.195.000,00	5,54

Penjelasan terkait realisasi penyerapan Dana Desa di Tahun sebelumnya dijabarkan sebagai rincian dari Dana Penyesuaian yang masih merupakan komponen dana transfer Pemerintah Pusat namun merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Bagan Akun Standar (BAS) Dana Desa merupakan komponen Transfer Pemerintah Pusat sehingga di Tahun 2023 penjelasan terkait realisasi penyerapan dana desa dijabarkan sebagai rincian dari Transfer Pemerintah Pusat.

6.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Bagi hasil pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten adalah pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan persentase yang telah

ditetapkan. Pemerintah provinsi memperoleh sumber daya keuangan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan dari masyarakat di wilayah provinsi tersebut. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota memperoleh sumber daya keuangan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan dari masyarakat di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp20.934.697.775,00, atau mencapai 103,43% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan sebesar Rp20.240.093.443,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan sebesar 0,89%. Jika dilihat dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah menyerap 4,06% dari total Pendapatan Transfer. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 34  
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		20.240.093.443,00	20.934.697.775,00	103,43	21.123.341.764,00	(188.643.989,00)	(0,89)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.240.093.443,00	20.934.697.775,00	103,43	21.123.341.764,00	(188.643.989,00)	(0,89)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Rincian pendapatan bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 35  
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		20.240.093.443,00	20.934.697.775,00	103,43	21.123.341.764,00	(188.643.989,00)	(0,89)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.527.792.648,00	3.905.005.338,00	110,69	3.757.158.681,00	147.846.657,00	3,94
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.242.062.098,00	2.718.634.470,00	83,86	3.145.133.795,00	(426.499.325,00)	(13,56)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.197.518.092,00	9.467.466.014,00	115,49	9.198.997.828,00	268.468.186,00	2,92

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenalkan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	100.000.000,00	94.789.985,00	94,79	115.861.309,00	(21.071.324,00)	(18,19)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.172.720.605,00	4.748.801.968,00	91,80	4.906.190.151,00	(157.388.183,00)	(3,21)

Pada tabel di atas menyajikan penetapan Anggaran Pendapatan transfer daerah pajak provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 98 tahun 2023 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Sejumlah Rp20.240.093.443,00 sedangkan berdasarkan R/C Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.934.697.775,00, adapun jumlah tersebut terdiri dari Piutang Tahun 2022 sebesar Rp9.992.403.561,00 dan Pendapatan Transfer tahun 2023 sesbesar Rp10.942.294.214,00.

6.1.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penghasilan yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan yang telah ditetapkan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.928.666.309,00, atau mencapai 94,97% dari anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditetapkan sebesar Rp4.136.784.540,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar 69,56%. Jika dilihat dari total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menyerap 0,73% dari total Pendapatan Daerah. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 36  
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4.136.784.540,00	3.928.666.309,00	94,97	12.906.932.247,00	(8.978.265.938,00)	(69,56)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.136.784.540,00	3.928.666.309,00	94,97	12.906.932.247,00	(8.978.265.938,00)	(69,56)



6.1.1.3.1. Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.928.666.309,00, atau mencapai 94,97% dari anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan sebesar Rp4.136.784.540,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengalami penurunan sebesar 69,56%. Jika dilihat dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menyerap 100,00% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 37  
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.136.784.540,00	3.928.666.309,00	94,97	12.906.932.247,00	(8.978.265.938,00)	(69,56)
1	Lain-Lain Pendapatan	4.136.784.540,00	3.928.666.309,00	94,97	12.906.932.247,00	(8.978.265.938,00)	(69,56)

Realisasi Lain - Lain Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.928.666.309,00, atau mencapai 94,97% dari anggaran Lain - Lain Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.136.784.540,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Lain - Lain Pendapatan mengalami penurunan sebesar 69,56%. Jika dilihat dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Lain - Lain Pendapatan menyerap 100,00% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian Lain - Lain Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 38  
Lain-lain Pendapatan  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Lain - Lain Pendapatan		4.136.784.540,00	3.928.666.309,00	94,97	12.906.932.247,00	(8.978.265.938,00)	(69,56)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	9.492.117.624,00	(9.492.117.624,00)	(100,00)
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	9.296.000,00	100,00	0,00	9.296.000,00	100,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.136.784.540,00	3.919.370.309,00	94,74	3.414.814.623,00	504.555.686,00	14,78

Lain-Lain Pendapatan pada akun Pendapatan atas Pengembalian Hibah terdapat realisasi sebesar Rp9.296.000,00 yang tidak dianggarkan pada Tahun 2023. Hal ini dikarenakan realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah tersebut merupakan pembayaran kontribusi atas keikutsertaan peserta dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk menentukan kode akun yang sesuai dalam penginputan kontribusi tersebut masuk pada Pendapatan atas Pengembalian Hibah dikarenakan untuk kontribusi Pendidikan dan pelatihan tidak dapat direncanakan jika ada peserta dari luar Kabupaten yang akan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan untuk kontribusi biaya keikutsertaan tersebut sudah tersetor pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.919.370.309,00, atau mencapai 94,74% dari anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditetapkan sebesar Rp4.136.784.540,00.

6.1.2. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp442.183.632.593,77 atau mencapai 89,99% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp491.359.703.372,00. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022, terjadi kenaikan sebesar Rp5.155.159.324,85, atau 1,18%. Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 39  
Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
BELANJA DAERAH	491.359.703.372,00	442.183.632.593,77	89,99	437.028.473.268,92	5.155.159.324,85	1,18

Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbagi menjadi tiga kelompok yaitu; Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dengan masing-masing besaran realisasi sebagai berikut:

Tabel 6.1. 40  
Rincian Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
BELANJA		491.359.703.372,00	442.183.632.593,77	89,99	437.028.473.268,92	5.155.159.324,85	1,18
1	BELANJA OPERASI	405.309.514.495,00	368.576.461.124,77	90,94	366.844.266.189,92	1.732.194.934,85	0,47
2	BELANJA MODAL	84.550.188.877,00	72.774.062.486,00	86,07	70.184.207.079,00	2.589.855.407,00	3,69
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	833.108.983,00	55,54	0,00	833.108.983,00	100,00

6.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp368.576.461.124,77, atau mencapai 90,94% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp405.309.514.495,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 0,47%. Jika dilihat dari total Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Operasi menyerap 83,35% dari total Belanja. Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 41  
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
BELANJA OPERASI		405.309.514.495,00	368.576.461.124,77	90,94	366.844.266.189,92	1.732.194.934,85	0,47
1	Belanja Pegawai	228.888.335.227,00	204.298.907.047,00	89,26	213.765.733.155,00	(9.466.826.108,00)	(4,43)
2	Belanja Barang dan Jasa	162.267.011.153,00	153.058.967.998,77	94,33	140.769.569.584,92	12.289.398.413,85	8,73
3	Belanja Hibah	10.865.391.715,00	7.988.809.679,00	73,53	3.096.894.020,00	4.891.915.659,00	157,96
4	Belanja Bantuan Sosial	3.288.776.400,00	3.229.776.400,00	98,21	9.212.069.430,00	(5.982.293.030,00)	(64,94)

6.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp204.298.907.047,00, atau mencapai 89,26% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp228.888.335.227,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar 4,43%. Jika dilihat dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Pegawai menyerap 55,43% dari total Belanja Operasi. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 42  
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Pegawai		228.888.335.227,00	204.298.907.047,00	89,26	213.765.733.155,00	(9.466.826.108,00)	(4,43)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	160.933.173.985,00	139.851.701.027,00	86,90	127.097.573.886,00	12.754.127.141,00	10,03
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.251.365.725,00	39.218.733.650,00	95,07	61.193.325.748,00	(21.974.592.098,00)	(35,91)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.165.620.887,00	16.919.856.729,00	93,14	17.087.456.886,00	(167.600.157,00)	(0,98)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.010.916.785,00	7.806.274.397,00	97,45	7.915.632.006,00	(109.357.609,00)	(1,38)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWKDH	184.111.897,00	167.924.728,00	91,21	167.344.629,00	580.099,00	0,35
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWKDH	343.145.948,00	334.416.516,00	97,46	304.400.000,00	30.016.516,00	9,86

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan merupakan seluruh aktivitas transaksi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2023 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Pegawai.

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp139.851.701.027,00, atau mencapai 86,90% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp160.933.173.985,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan sebesar 10,03%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Gaji dan Tunjangan ASN menyerap 68,45% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 43  
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenalkan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		160.933.173.985,00	139.851.701.027,00	86,90	127.097.573.886,00	12.754.127.141,00	10,03
1	Belanja Gaji Pokok ASN	120.032.138.430,00	103.608.987.211,00	86,32	93.240.893.312,00	10.368.093.899,00	11,12
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.460.332.872,00	9.356.761.709,00	89,45	8.644.007.080,00	712.754.629,00	8,25
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.908.648.000,00	4.860.359.360,00	99,02	5.039.794.810,00	(179.435.450,00)	(3,56)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.179.701.720,00	5.931.483.591,00	95,98	5.185.316.000,00	746.167.591,00	14,39
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.097.252.687,00	2.023.916.496,00	65,35	1.555.701.000,00	468.215.496,00	30,10

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.340.984.429,00	6.399.466.986,00	87,17	5.853.638.901,00	545.828.085,00	9,32
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	319.419.423,00	308.152.060,00	96,47	282.313.693,00	25.838.367,00	9,15
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.210.319,00	1.778.116,00	34,13	1.430.893,00	347.223,00	24,27
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.437.177.577,00	6.505.724.374,00	87,48	6.502.525.204,00	3.199.170,00	0,05
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	288.077.132,00	214.115.034,00	74,33	216.245.390,00	(2.130.356,00)	(0,99)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	864.231.396,00	640.956.090,00	74,16	575.707.603,00	65.248.487,00	11,33

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp39.218.733.650,00, atau mencapai 95,07% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp41.251.365.725,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami penurunan sebesar 35,91%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Tambahan Penghasilan ASN menyerap 19,20% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 44  
Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN		41.251.365.725,00	39.218.733.650,00	95,07	61.193.325.748,00	(21.974.592.098,00)	(35,91)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.251.365.725,00	39.218.733.650,00	95,07	61.193.325.748,00	(21.974.592.098,00)	(35,91)

Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 45  
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		41.251.365.725,00	39.218.733.650,00	95,07	61.193.325.748,00	(21.974.592.098,00)	(35,91)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41.192.415.382,00	39.172.340.150,00	95,10	61.124.894.368,00	(21.952.554.218,00)	(35,91)
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	58.950.343,00	46.393.500,00	78,70	68.431.380,00	(22.037.880,00)	(32,20)

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp16.919.856.729,00, atau mencapai 93,14% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp18.165.620.887,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami penurunan sebesar 0,98%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN menyerap 8,28% dari total Belanja Pegawai. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 46  
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		18.165.620.887,00	16.919.856.729,00	93,14	17.087.456.886,00	(167.600.157,00)	(0,98)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	380.408.667,00	363.146.125,00	95,46	222.172.806,00	140.973.319,00	63,45
2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	16.750.714.220,00	15.580.922.604,00	93,02	15.215.826.080,00	365.096.524,00	2,40
3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	628.750.000,00	593.000.000,00	94,31	529.750.000,00	63.250.000,00	11,94
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(100,00)
5	Belanja Honorarium	405.748.000,00	382.788.000,00	94,34	369.708.000,00	13.080.000,00	3,54

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.806.274.397,00, atau mencapai 97,45% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp8.010.916.785,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami penurunan sebesar 1,38%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD menyerap 3,82% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 47  
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		8.010.916.785,00	7.806.274.397,00	97,45	7.915.632.006,00	(109.357.609,00)	(1,38)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	447.163.500,00	99,09	451.290.000,00	(4.126.500,00)	(0,91)
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	49.945.480,00	49.866.600,00	99,84	49.110.600,00	756.000,00	1,54
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	52.439.612,00	51.707.880,00	98,60	51.563.040,00	144.840,00	0,28
4	Belanja Uang Paket DPRD	39.339.594,00	38.209.500,00	97,13	38.682.000,00	(472.500,00)	(1,22)
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	647.519.250,00	98,95	654.370.500,00	(6.851.250,00)	(1,05)
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.163.660,00	70.004.550,00	98,37	69.974.100,00	30.450,00	0,04
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	37.161.180,00	34.530.300,00	92,92	36.540.000,00	(2.009.700,00)	(5,50)
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.493.100.000,00	98,75	1.512.000.000,00	(18.900.000,00)	(1,25)
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	365.400.000,00	96,67	378.000.000,00	(12.600.000,00)	(3,33)
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	139.143.644,00	131.885.043,00	94,78	136.817.742,00	(4.932.699,00)	(3,61)
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.551.383.115,00	2.466.887.774,00	96,69	2.497.284.024,00	(30.396.250,00)	(1,22)
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.074.680.000,00	2.010.000.000,00	96,88	2.040.000.000,00	(30.000.000,00)	(1,47)

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp167.924.728,00, atau mencapai 91,21%

dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp184.111.897,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami kenaikan sebesar 0,35%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH menyerap 0,08% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 48  
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		184.111.897,00	167.924.728,00	91,21	167.344.629,00	580.099,00	0,35
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.612.470,00	54.600.000,00	99,98	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.644.000,00	3.528.000,00	53,10	3.528.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.281.120,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.686.560,00	4.055.520,00	60,65	3.476.160,00	579.360,00	16,67
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.890.244,00	1.647.928,00	15,13	1.647.429,00	499,00	0,03
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	42.000,00	1.440,00	3,43	1.200,00	240,00	20,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.381.503,00	5.362.560,00	84,03	5.362.560,00	0,00	0,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	143.500,00	112.320,00	78,27	112.320,00	0,00	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	430.500,00	336.960,00	78,27	336.960,00	0,00	0,00

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp334.416.516,00, atau mencapai 97,46% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp343.145.948,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami kenaikan sebesar 9,86%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH menyerap 0,16% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 49

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenalkan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		343.145.948,00	334.416.516,00	97,46	304.400.000,00	30.016.516,00	9,86
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	104.400.000,00	94,16	104.400.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	232.265.948,00	230.016.516,00	99,03	200.000.000,00	30.016.516,00	15,01

6.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp153.058.967.998,77, atau mencapai 94,33% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp162.267.011.153,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Barang Dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 8,73%. Jika dilihat dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Barang Dan Jasa menyerap 41,53% dari total Belanja Operasi. Rincian Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 50

Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Barang dan Jasa		162.267.011.153,00	153.058.967.998,77	94,33	140.769.569.584,92	12.289.398.413,85	8,73
1	Belanja Barang	24.389.466.551,00	22.155.999.608,00	90,84	18.901.140.313,00	3.254.859.295,00	17,22
2	Belanja Jasa	66.765.148.570,00	61.688.656.609,38	92,40	56.556.998.809,08	5.131.657.800,30	9,07
3	Belanja Pemeliharaan	10.733.317.885,00	10.385.664.353,39	96,76	10.520.478.330,84	(134.813.977,45)	(1,28)
4	Belanja Perjalanan Dinas	51.957.740.688,00	50.590.596.838,00	97,37	46.900.437.697,00	3.690.159.141,00	7,87
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	793.526.000,00	717.034.980,00	90,36	358.200.000,00	358.834.980,00	100,18
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.627.811.459,00	7.521.015.610,00	98,60	7.532.314.435,00	(11.298.825,00)	(0,15)

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp22.155.999.608,00, atau mencapai 90,84% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp24.389.466.551,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar 17,22%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Barang menyerap 14,48% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 51  
Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Barang		24.389.466.551,00	22.155.999.608,00	90,84	18.901.140.313,00	3.254.859.295,00	17,22
1	Belanja Barang Pakai Habis	24.386.823.463,00	22.153.364.608,00	90,84	18.901.140.313,00	3.252.224.295,00	17,21
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.643.088,00	2.635.000,00	99,69	0,00	2.635.000,00	0,00

Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang merupakan Belanja Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang realisasinya di Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp22.153.364.608,00, atau mencapai 90,84% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp24.386.823.463,00. Rincian Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 52  
Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Barang Pakai Habis		24.386.823.463,00	22.153.364.608,00	90,84	18.901.140.313,00	3.252.224.295,00	17,21
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	137.826.531,00	137.038.617,00	99,43	239.571.279,00	(102.532.662,00)	(42,80)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	19.179.110,00	(19.179.110,00)	(100,00)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.629.538.558,00	1.532.017.117,00	94,02	1.568.721.279,00	(36.704.162,00)	(2,34)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	577.440.489,00	540.753.870,00	93,65	25.713.300,00	515.040.570,00	2.003,01

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.481.170,00	15.481.170,00	100,00	22.979.600,00	(7.498.430,00)	(32,63)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	99.546.900,00	86.506.568,00	86,90	109.053.234,00	(22.546.666,00)	(20,67)
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.422.282.144,00	2.082.323.451,00	85,97	859.372.900,00	1.222.950.551,00	142,31
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	71.100.000,00	69.997.000,00	98,45	11.000.000,00	58.997.000,00	536,34
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	29.600.000,00	29.600.000,00	100,00	0,00	29.600.000,00	100,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	10.000.000,00	9.990.800,00	99,91	0,00	9.990.800,00	100,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	870.000,00	(870.000,00)	(100,00)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	760.521.938,00	698.191.237,00	91,80	713.279.652,00	(15.088.415,00)	(2,12)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	970.794.874,00	916.323.540,00	94,39	982.677.946,00	(66.354.406,00)	(6,75)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.661.729.043,00	1.371.229.394,00	82,52	1.434.054.946,00	(62.825.552,00)	(4,38)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	251.060.810,00	233.391.218,00	92,96	247.546.888,00	(14.155.670,00)	(5,72)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	588.725.440,00	544.146.732,00	92,43	654.299.451,00	(110.152.719,00)	(16,84)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.991.000,00	8.910.000,00	99,10	10.740.990,00	(1.830.990,00)	(17,05)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	290.602.948,00	276.853.710,00	95,27	326.938.816,00	(50.085.106,00)	(15,32)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	11.544.000,00	(11.544.000,00)	(100,00)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	721.575.930,00	692.934.027,00	96,03	767.418.616,00	(74.484.589,00)	(9,71)
21	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.008.500.560,00	1.873.822.924,00	93,29	2.216.699.840,00	(342.876.916,00)	(15,47)
22	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	69.000.000,00	67.510.000,00	97,84	0,00	67.510.000,00	100,00
23	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.453.072.221,00	3.308.409.770,00	95,81	2.032.523.291,00	1.275.886.479,00	62,77
24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.187.945.746,00	2.787.365.679,00	87,43	2.193.976.873,00	593.388.806,00	27,05
25	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.729.459.331,00	2.708.261.053,00	99,22	3.054.003.537,00	(345.742.484,00)	(11,32)
26	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	679.680.000,00	614.109.000,00	90,35	470.843.890,00	143.265.110,00	30,43
27	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	702.303.630,00	281.685.231,00	40,11	9.906.500,00	271.778.731,00	2.743,44
28	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.040.000,00	32.371.000,00	97,98	52.670.000,00	(20.299.000,00)	(38,54)
29	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	352.030.000,00	350.777.000,00	99,64	288.526.000,00	62.251.000,00	21,58
30	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	28.305.000,00	27.900.000,00	98,57	3.500.000,00	24.400.000,00	697,14



No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
31	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	222.000.000,00	199.800.000,00	90,00	3.530.000,00	196.270.000,00	5.560,06
32	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.984.000,00	15.984.000,00	100,00	36.408.000,00	(20.424.000,00)	(56,10)
33	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	234.703.500,00	234.696.000,00	100,00	0,00	234.696.000,00	100,00
34	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	16.872.000,00	16.864.000,00	99,95	15.932.000,00	932.000,00	5,85
35	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
36	Belanja Pakaian Adat Daerah	41.750.000,00	27.750.000,00	66,47	13.820.000,00	13.930.000,00	100,80
37	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.300.000,00	14.000.000,00	97,90	41.980.000,00	(27.980.000,00)	(66,65)
38	Belanja Pakaian Olahraga	156.066.000,00	151.515.000,00	97,08	260.235.585,00	(108.720.585,00)	(41,78)
39	Belanja Pakaian Paskibraka	194.993.700,00	194.855.500,00	99,93	184.802.790,00	10.052.710,00	5,44
40	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	13.320.000,00	(13.320.000,00)	(100,00)

Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang merupakan Belanja Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang realisasinya di Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp22.153.364.608,00, atau mencapai 90,84% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp24.386.823.463,00. Rincian Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 53

Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Barang Tak Habis Pakai		2.643.088,00	2.635.000,00	99,69	0,00	2.635.000,00	0,00
1	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	598.645,00	594.000,00	99,22	0,00	594.000,00	100,00
2	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.044.443,00	2.041.000,00	99,83	0,00	2.041.000,00	100,00

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp61.688.656.609,38, atau mencapai 92,40% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp66.765.148.570,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Jasa mengalami

kenaikan sebesar 9,07%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Jasa menyerap 40,30% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 54  
Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Jasa		66.765.148.570,00	61.688.656.609,38	92,40	56.556.998.809,08	5.131.657.800,30	9,07
1	Belanja Jasa Kantor	45.563.386.932,00	41.022.548.568,38	90,03	52.242.652.052,08	(11.220.103.483,70)	(21,48)
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.147.793.423,00	14.137.501.913,00	99,93	529.606.067,00	13.607.895.846,00	2.569,44
3	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.225.706.065,00	4.069.877.464,00	96,31	935.371.766,00	3.134.505.698,00	335,11
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.254.250,00	866.033.043,00	86,58	1.172.870.000,00	(306.836.957,00)	(26,16)
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	915.257.900,00	899.415.200,00	98,27	889.136.354,00	10.278.846,00	1,16
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	912.750.000,00	693.280.421,00	75,96	757.362.570,00	(64.082.149,00)	(8,46)

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.385.664.353,39, atau mencapai 96,76% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp10.733.317.885,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 1,28%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Pemeliharaan menyerap 6,79% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 55  
Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Pemeliharaan		10.733.317.885,00	10.385.664.353,39	96,76	10.520.478.330,84	(134.813.977,45)	(1,28)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.651.120.105,00	3.374.467.291,00	92,42	4.800.464.107,84	(1.425.996.816,84)	(29,71)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.553.448.170,00	2.482.506.855,39	97,22	1.392.389.872,00	1.090.116.983,39	78,29

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.528.749.610,00	4.528.690.207,00	100,00	4.327.624.351,00	201.065.856,00	4,65

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp50.590.596.838,00, atau mencapai 97,37% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp51.957.740.688,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Perjalanan Dinas mengalami kenaikan sebesar 7,87%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Perjalanan Dinas menyerap 33,05% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 56  
Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Perjalanan Dinas		51.957.740.688,00	50.590.596.838,00	97,37	46.900.437.697,00	3.690.159.141,00	7,87
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.808.474.688,00	50.441.330.838,00	97,36	46.900.437.697,00	3.540.893.141,00	7,55
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	149.266.000,00	149.266.000,00	100,00	0,00	149.266.000,00	100,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp50.590.596,838,00, atau mencapai 97,37% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp51.957.740.680,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 7,78%. Jika dilihat dari total Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri menyerap 99,70% dari total Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 57  
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		51.808.474.688,00	50.441.330.838,00	97,36	46.900.437.697,00	3.540.893.141,00	7,55
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.270.110.528,00	32.908.120.745,00	98,91	28.720.237.468,00	4.187.883.277,00	14,58
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.028.088.299,00	1.910.675.793,00	94,21	1.184.816.563,00	725.859.230,00	61,26
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.326.025.861,00	15.450.004.300,00	94,63	16.745.507.666,00	(1.295.503.366,00)	(7,74)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	184.250.000,00	172.530.000,00	93,64	249.876.000,00	(77.346.000,00)	(30,95)

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp717.034.980,00, atau mencapai 90,36% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp793.526.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 100,18%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menyerap 0,47% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 58  
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		793.526.000,00	717.034.980,00	90,36	358.200.000,00	358.834.980,00	100,18
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	655.795.000,00	632.284.980,00	96,42	357.850.000,00	274.434.980,00	76,69
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	137.731.000,00	84.750.000,00	61,53	350.000,00	84.400.000,00	24.114,29

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp632.284.980,00, atau mencapai 96,42% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp655.795.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 76,69%. Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 59  
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		655.795.000,00	632.284.980,00	96,42	357.850.000,00	274.434.980,00	76,69
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	276.795.000,00	253.284.980,00	91,51	120.850.000,00	132.434.980,00	109,59
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	27.000.000,00	52.000.000,00	192,59
3	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	(210.000.000,00)	(100,00)
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada LPM	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	300.000.000,00	100,00

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp84.750.000,00, atau mencapai 61,53% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp137.731.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 24.114,29%. Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 60  
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	137.731.000,00	84.750.000,00	61,53	350.000,00	84.400.000,00	24.114,29
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)	(100,00)
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	137.731.000,00	84.750.000,00	61,53	0,00	84.750.000,00	100,00

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Penganggaran Barang dan Jasa BOS pada Tahun Anggaran 2023 menggunakan 2 (dua) aplikasi yang berbeda yaitu aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOS (ARKAS BOS). Penggunaan 2 (dua) aplikasi ini terjadi karena:

- a. Penganggaran Pemerintah yang diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya dilakukan perekaman anggaran ke aplikasi FMIS sebagai penyajian pelaporan dan transaksi.
- b. Penganggaran sekolah bersumber dari Dana BOS yang menggunakan aplikasi ARKAS BOS dari Kementerian Pendidikan.

Terdapat perbedaan besaran anggaran pada masing-masing belanja dikarenakan perbedaan waktu penetapan pada tiap aplikasi. Hal tersebut terjadi karena penganggaran FMIS masih menggunakan estimasi angka saat APBD 2023 ditetapkan (data bulan desember 2022) karena data final ARKAS akan didapatkan pada bulan Januari 2023 (saat sekolah selesai menginput ARKAS). Untuk Belanja Barang dan Jasa mengalami selisih penganggaran jika dibandingkan dengan sistem Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOS (ARKAS BOS). Selisih tersebut terdapat pada penganggaran jenjang sekolah dasar (SD).

Belanja Barang dan Jasa BOS SD pada aplikasi FMIS sebesar Rp5.383.205.312 dan Belanja Barang dan Jasa BOS SD pada aplikasi ARKAS sebesar Rp5.062.918.153 atau terdapat selisih lebih pada aplikasi FMIS sebesar Rp320.287.159, selisih tersebut tersebar pada:

- a. Sebesar Rp235.200.000 bergeser ke Belanja Hibah Dana BOS SD karena merupakan anggaran sekolah swasta SD yang terinput di Belanja Barang dan Jasa SD Negeri yang



bersumber dari Dana BOS Reguler pada SD Khatolik Xaverius Guaan sebesar Rp150.920.000 dan SD Kristen 3 Bangunan Wuwuk sebesar Rp84.280.000 pada aplikasi ARKAS.

- b. Sebesar Rp22.500.000 bergeser ke Belanja Hibah Dana BOS SD karena merupakan anggaran sekolah swasta SD yang terinput di Belanja Barang dan Jasa SD Negeri yang bersumber dari Dana BOS Kinerja pada SD Khatolik Paulus pada aplikasi ARKAS.
- c. Sebesar Rp52.587.159 bergeser ke Aset Tetap Lainnya SD yang bersumber dari Dana BOS Reguler Negeri pada aplikasi ARKAS.
- d. Sebesar Rp10.000.000 bergeser ke Barang dan Jasa SMP yang bersumber dari Dana BOS Reguler Negeri pada aplikasi ARKAS.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.521.015.610,00, atau mencapai 98,60% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.627.811.459,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Barang dan Jasa BOS mengalami penurunan sebesar 0,15%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Barang dan Jasa BOS menyerap 4,91% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 61  
Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.627.811.459,00	7.521.015.610,00	98,60	7.532.314.435,00	(11.298.825,00)	(0,15)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.627.811.459,00	7.521.015.610,00	98,60	7.532.314.435,00	(11.298.825,00)	(0,15)

6.1.2.1.3. Belanja Hibah

Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.988.809.679,00, atau mencapai 73,53% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp10.865.391.715,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar 157,96%. Jika dilihat dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Hibah menyerap 2,17% dari total Belanja Operasi. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 62  
Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Hibah		10.865.391.715,00	7.988.809.679,00	73,53	3.096.894.020,00	4.891.915.659,00	157,96
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.903.415.695,00	6.769.133.659,00	68,35	2.629.618.000,00	4.139.515.659,00	157,42
2	Belanja Hibah Dana BOS	494.700.000,00	752.400.000,00	152,09	0,00	752.400.000,00	100,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	467.276.020,00	467.276.020,00	100,00	467.276.020,00	0,00	0,00

1. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.769.133.659,00, atau mencapai 68,35% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp9.903.415.695,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami kenaikan sebesar 157,42%. Jika dilihat dari total Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia menyerap 84,73% dari total Belanja Hibah. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 63

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,  
Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.903.415.695,00	6.769.133.659,00	68,35	2.629.618.000,00	4.139.515.659,00	157,42
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.553.415.695,00	5.419.133.659,00	63,36	1.629.618.000,00	3.789.515.659,00	232,54
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	700.000.000,00	(400.000.000,00)	(57,14)
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00	450.000.000,00	0,00

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.419.133.659,00, atau mencapai 63,36% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp8.553.415.695,00. Adapun rinciannya sebagai berikut :
- Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 117 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Palang Merah Indonesia Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp300.000.000,00.
  - Hibah Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 160 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp1.000.000.000,00.
  - Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 113 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kegiatan Operasional Penunjang



Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp57.723.980,00.

- Hibah Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 281 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Dharma Wanita Persatuan Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp200.000.000,00.
  - Hibah Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 189 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp1.894.596.129,00.
  - Hibah Kepada Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp1.966.813.550,00.
- b. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp600.000.000,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Magfirah Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Annur Desa Atoga Kecamatan Motongkad Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.

- Hibah Kepada Gereja GPDJ Bethesda Atoga Timur Desa Atoga Tidur Kecamatan Motongkad Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Multazam Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Darul Jannah Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Nurul Qolbi Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Gereja GMIBM Baitel Moyongkota Kecamatan Modayag Barat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
- Hibah Kepada Gereja GPDJ Elsaddai Jiko Belanga Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Furqon Desa Paret Kecamatan Kotabunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk

Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.

- Hibah Kepada Masjid Annur Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp20.000.000,00.
- Hibah Kepada Gereja GMIBM Baitel Imanuel Modayag Desa Modayag Kecamatan Modayag Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Gereja GMIBM Eklesia Paret Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Muhklisin Desa Buyat II Kecamatan Kotabunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Nurul Chairiyah Desa Nuangan 1 Kecamatan Nuangan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Hidayah Desa Jiko Utara Kecamatan Motongkad Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.



- Hibah Kepada Gereja GMIBM Eklesia Kokapoi Desa Kokapoi Kecamatan Mooat Barat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Arrahman Desa Tangaton Kecamatan Modayag Barat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp15.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Baiturrahim Desa Molobog Kecamatan Motongkad Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Annur Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan ReNomorvasi Serta Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp5.000.000,00.
- c. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp300.000.000,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.
- Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013 Tahun 2020 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Bhakti 2019 - 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp300.000.000,00.
- d. Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar

Rp450.000.000,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp450.000.000,00.

- Hibah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bolaang Mongondow Timur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : 118 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Gerakan Pramuka Daerah Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp200.000.000,00.
- Hibah Kepada KNPI Kab Bolaang Mongondow Timur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : 329 Tahun 2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Tahun Anggaran 2023 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp250.000.000,00.

## 2. Belanja Hibah Dana BOS

Penganggaran Belanja Hibah BOS pada Tahun Anggaran 2023 terjadi pelampauan anggaran pada aplikasi ARKAS BOS dibandingkan dengan aplikasi FMIS, hal ini dikarenakan terdapat Belanja Hibah yang bergeser ke Belanja Barang dan Jasa BOS SD sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp235.200.000 bergeser ke Belanja Barang dan Jasa BOS SD yang merupakan anggaran sekolah swasta SD Khatolik Xaverius Guaan sebesar Rp150.920.000 dan SD Kristen 3 Bangunan Wuwuk sebesar Rp84.280.000.
- b. Sebesar Rp22.500.000 bergeser ke Belanja Barang dan Jasa BOS SD yang merupakan anggaran sekolah swasta SD Khatolikt paulus.

Secara realisasi anggaran terjadi pelampauan Realisasi pada Belanja Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp752.400.000,00, atau mencapai 152,09% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp494.700.000,00, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Pendidikan selaku pengelola Dana BOS dan BPKPD sehingga terdapat adanya anggaran yang bergeser dari Belanja Hibah BOS ke Belanja Barang dan Jasa BOS. Untuk Tahun Anggaran 2022 Belanja Hibah Dana BOS tidak dianggarkan. Rincian Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 64  
Rincian Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Hibah Dana BOS		494.700.000,00	752.400.000,00	152,09	0,00	752.400.000,00	100,00
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	266.560.000,00	524.260.000,00	196,68	0,00	524.260.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	228.140.000,00	228.140.000,00	100,00	0,00	228.140.000,00	100,00

3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp467.276.020,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp467.276.020,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak dianggarkan, sehingga Belanja Hibah Keuangan kepada Partai Politik tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Dilihat dari total Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyerap 15,09% dari total Belanja Hibah. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 65  
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenalkan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		467.276.020,00	467.276.020,00	100,00	467.276.020,00	0,00	0,00
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	467.276.020,00	467.276.020,00	100,00	467.276.020,00	0,00	0,00

Berdasarkan data Realisasi Belanja Hibah Bantuan Kuangan kepada Partai Politik diatas dapat dirinci Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 233 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.1. 66  
Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah	Harga Per Suara	Jumlah Alokasi Bantuan
1	Partai Amanat Nasional	4	11.070,00	10.354,00	114.618.780,00
2	Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan	3	6.781,00	10.354,00	70.210.474,00
3	Partai Nasional Demokrat	3	6.779,00	10.354,00	70.189.766,00
4	Partai Golongan Karya	3	6.097,00	10.354,00	63.128.338,00
5	Partai Demokrat	2	5.375,00	10.354,00	55.652.750,00
6	Partai Persatuan Indonesia	1	2.275,00	10.354,00	23.555.350,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	2.124,00	10.354,00	21.991.896,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	1.939,00	10.354,00	20.076.406,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1.686,00	10.354,00	17.456.844,00
10	Partai Bulan Bintang	1	1.004,00	10.354,00	10.395.416,00
Jumlah		20	45.130,00		467.276.020,00

6.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.229.776.400,00, atau mencapai 98,21% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.288.776.400,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar 64,94%. Jika dilihat dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Bantuan Sosial menyerap 0,88% dari total Belanja Operasi. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 67  
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Bantuan Sosial		3.288.776.400,00	3.229.776.400,00	98,21	9.212.069.430,00	(5.982.293.030,00)	(64,94)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	783.250.000,00	731.750.000,00	93,42	1.238.800.000,00	(507.050.000,00)	(40,93)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	815.000.000,00	(815.000.000,00)	(100,00)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.505.526.400,00	2.498.026.400,00	99,70	7.158.269.430,00	(4.660.243.030,00)	(65,10)

6.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp72.774.062.486,00, atau mencapai 86,07% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp84.550.188.877,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 3,69%. Jika dilihat dari total Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Modal menyerap 16,46% dari total Belanja. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 68  
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
BELANJA MODAL		84.550.188.877,00	72.774.062.486,00	86,07	70.184.207.079,00	2.589.855.407,00	3,69
1	Belanja Modal Tanah	464.314.057,00	464.000.000,00	99,93	78.875.000,00	385.125.000,00	488,27
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.821.943.359,00	11.779.437.073,00	62,58	10.743.662.655,00	1.035.774.418,00	9,64
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.161.423.521,00	12.875.615.513,00	79,67	16.259.270.341,00	(3.383.654.828,00)	(20,81)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.466.419.642,00	46.872.630.461,00	96,71	42.003.471.945,00	4.869.158.516,00	11,59
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	636.088.298,00	782.379.439,00	123,00	1.098.927.138,00	(316.547.699,00)	(28,81)

Rincian realisasi belanja modal per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada Lampiran 3.

6.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Tanah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja modal tanah dapat mencakup pembelian tanah, pembangunan fasilitas di atas tanah, pembayaran biaya-biaya terkait pengalihan kepemilikan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan aset tanah.

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp464.000.000,00, atau mencapai 99,93% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp464.314.057,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan sebesar 488,27%. Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 69  
Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Modal Tanah		464.314.057,00	464.000.000,00	99,93	78.875.000,00	385.125.000,00	488,27
1	Belanja Modal Tanah Persil	464.314.057,00	464.000.000,00	99,93	0,00	464.000.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, Secara keseluruhan merupakan seluruh aktifitas transaksi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Modal Tanah.

Pada tahun 2023 terdapat pengadaan tanah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada SD Motongkad namun masih memiliki sisa luasan sebesar 135,055m<sup>2</sup> yang sudah dikuasai pemerintah daerah tapi belum dilakukan pemindahan hak.

6.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap ini termasuk mesin produksi, peralatan kantor, kendaraan, peralatan medis, dan peralatan teknologi informasi, yang umumnya memiliki umur



pemakaian yang cukup lama dan diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan produksi yang efektif. Belanja modal peralatan dan mesin dianggap sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional.

Penganggaran Belanja Peralatan dan Mesin BOS pada Tahun Anggaran 2023 terjadi pelampauan anggaran pada aplikasi FMIS dibandingkan dengan pada aplikasi ARKAS BOS, hal ini dikarenakan terdapat Belanja Peralatan dan Mesin BOS SD yang bergeser ke Belanja Aset Tetap Lainnya BOS SD sebesar Rp143.107.632 yang bersumber dari Dana BOS Reguler Negeri. Sedangkan untuk Peralatan dan Mesin BOS SMP terdapat belanja yang bergeser:

- a. Sebesar Rp211.188.580 bergeser ke Belanja Aset Tetap Lainnya BOS SMP yang bersumber dari Dana BOS Reguler Negeri.
- b. Sebesar Rp205.870.814 bergeser ke Belanja Barang dan Jasa BOS SMP yang bersumber dari Dana BOS Reguler Negeri.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.707.958.187,00, atau mencapai 84,88% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.012.199.803,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Peralatan dan Mesin BOS mengalami penurunan sebesar 7,04%. Jika dilihat dari total Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Peralatan dan Mesin BOS menyerap 14,5% dari total Belanja Peralatan dan Mesin. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 6.1. 69 dibawah.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp11.779.437.073,00, atau mencapai 62,58% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp18.821.943.359,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 9,64%. Jika dilihat dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Modal Peralatan dan Mesin menyerap 16,19% dari total Belanja Modal. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 70  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		18.821.943.359,00	11.779.437.073,00	62,58	10.743.662.655,00	1.035.774.418,00	9,64
1	Belanja Modal Alat Besar	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	1.529.940.000,00	(1.520.940.000,00)	(99,41)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.763.746.825,00	538.000.000,00	9,33	278.950.000,00	259.050.000,00	92,87
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.974.076.648,00	1.913.531.999,00	96,93	1.046.293.600,00	867.238.399,00	82,89
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	503.308.463,00	469.794.013,00	93,34	1.300.512.513,00	(830.718.500,00)	(63,88)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.782.223.074,00	5.489.445.683,00	80,94	1.435.389.438,00	4.054.056.245,00	282,44
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	302.178.200,00	(302.178.200,00)	(100,00)
9	Belanja Modal Komputer	1.742.566.046,00	1.651.707.191,00	94,79	3.144.215.789,00	(1.492.508.598,00)	(47,47)
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	30.580.500,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
11	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	100.503.489,00	(100.503.489,00)	(100,00)
12	BeBelanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.012.199.803,00	1.707.958.187,00	84,88	1.595.679.626,00	112.278.561,00	7,04

6.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh, membangun, mengembangkan, atau memperbaiki gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah atau instansi publik lainnya. Belanja modal ini biasanya termasuk dalam anggaran tahunan pemerintah untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik.

Gedung dan bangunan yang dimaksud dalam belanja modal ini dapat berupa bangunan pemerintah seperti kantor, sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur lain atau fasilitas publik lainnya. Tujuan dari belanja modal Gedung dan Bangunan adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp12.875.615.513,00, atau mencapai 79,67% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp16.161.423.521,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 20,81%. Jika dilihat dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Modal Gedung dan Bangunan menyerap 17,69% dari total Belanja Modal. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 71  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.161.423.521,00	12.875.615.513,00	79,67	16.259.270.341,00	(3.383.654.828,00)	(20,81)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.336.660.631,00	12.127.665.132,00	79,08	15.324.883.210,00	(3.197.218.078,00)	(20,86)
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	824.762.890,00	747.950.381,00	90,69	934.387.131,00	(186.436.750,00)	(19,95)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2023, Secara keseluruhan merupakan seluruh aktifitas transaksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2023 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

6.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, perawatan, dan pengembangan jalan, Jaringan, dan Irigasi. Belanja jalan, Jaringan, dan Irigasi meliputi biaya pengadaan material, biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya pemeliharaan, biaya pembebasan lahan, dan biaya lain-lain yang terkait dengan pembangunan, perawatan, dan pengembangan jalan, jaringan, irigasi.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp46.872.630.461,00, atau mencapai 96,71% dari



anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp48.466.419.642,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar 11,59%. Jika dilihat dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi menyerap 64,41% dari total Belanja Modal. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 72  
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		48.466.419.642,00	46.872.630.461,00	96,71	42.003.471.945,00	4.869.158.516,00	11,59
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	41.539.056.401,00	40.667.633.885,00	97,90	31.066.863.811,00	9.600.770.074,00	30,90
2	Belanja Modal Bangunan Air	2.509.890.241,00	2.504.996.576,00	99,81	10.936.608.134,00	(8.431.611.558,00)	(77,10)
3	Belanja Modal Instalasi	4.417.473.000,00	3.700.000.000,00	83,76	0,00	3.700.000.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2023, Secara keseluruhan merupakan seluruh aktivitas transaksi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

6.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Aset tetap lainnya adalah jenis aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori bangunan, mesin, atau kendaraan. Aset tetap lainnya biasanya berkaitan dengan peralatan atau benda-benda yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan atau pemerintah.

Penganggaran Belanja Aset Tetap Lainnya BOS pada Tahun Anggaran 2023 terjadi pelampauan anggaran pada aplikasi ARKAS BOS dibandingkan dengan aplikasi FMIS, hal ini dikarenakan terdapat Belanja Aset Tetap Lainnya yang bergeser ke Belanja Barang dan Jasa BOS dan Peralatan dan Mesin BOS:

- a. Sebesar Rp52.587.159 bergeser ke Belanja Barang dan Jasa BOS SD yang bersumber dari Dana BOS Reguler Negeri.
- b. Sebesar Rp143.107.632 bergeser ke Belanja Peralatan dan Mesin SD yang bersumber dari Dana BOS Reguler Negeri.

Secara realisasi anggaran terjadi pelampauan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp611.166.461,00, atau mencapai 132,15% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp462.488.738,00, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Pendidikan selaku pengelola Dana BOS dan BPKPD sehingga terdapat adanya anggaran yang bergeser dari Belanja Aset Tetap Lainnya BOS ke belanja Barang dan Jasa BOS serta Belanja Peralatan dan Mesin BOS. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Aset Tetap Lainnya BOS mengalami kenaikan sebesar 30,59%. Jika dilihat dari total Belanja Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Aset Tetap Lainnya BOS menyerap 78,12% dari total Belanja Aset Tetap Lainnya. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 6.1. 72 dibawah.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp782.379.439,00, atau mencapai 123,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp636.088.298,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 28,81%. Jika dilihat dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menyerap 1,08% dari total Belanja Modal. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 73  
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	636.088.298,00	782.379.439,00	123,00	1.098.927.138,00	(316.547.699,00)	(28,81)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	173.599.560,00	171.212.978,00	98,63	548.503.565,00	(377.290.587,00)	(68,79)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	107.381.400,00	(107.381.400,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	(18.850.000,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	462.488.738,00	611.166.461,00	132,15	424.192.173,00	186.974.288,00	44,08

6.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp833.108.983,00, atau mencapai 55,54% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar 100,00%. Jika dilihat dari total Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Tidak Terduga menyerap 0,19% dari total Belanja. Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 74  
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
BELANJA TIDAK TERDUGA		1.500.000.000,00	833.108.983,00	55,54	0,00	833.108.983,00	100,00
1	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	833.108.983,00	55,54	0,00	833.108.983,00	100,00

6.1.3. Transfer

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp97.366.771.567,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp97.367.428.237,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Transfer mengalami kenaikan sebesar 4,79%. Rincian Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 75  
Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	TRANSFER	97.367.428.237,00	97.366.771.567,00	100,00	92.919.336.584,00	4.447.434.983,00	4,79

6.1.3.1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.154.378.387,00, atau mencapai 99,94% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.155.035.037,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar 53,22%. Jika dilihat dari total Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Bagi Hasil menyerap 1,19% dari total Transfer. Rincian Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 76  
Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Bagi Hasil	1.155.035.037,00	1.154.378.387,00	99,94	753.406.250,00	400.972.137,00	53,22
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.155.035.037,00	1.154.378.387,00	99,94	753.406.250,00	400.972.137,00	53,22

Dalam mengelola belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merujuk ke Surat Keputusan Bupati No.24 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.

6.1.3.2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp96.212.393.180,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp96.212.393.200,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 4,39%. Jika dilihat dari total Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023, maka Belanja Bantuan Keuangan

menyerap 98,81% dari total Transfer. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 77  
Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Bantuan Keuangan		96.212.393.200,00	96.212.393.180,00	100,00	92.165.930.334,00	4.046.462.846,00	4,39
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	96.212.393.200,00	96.212.393.180,00	100,00	92.165.930.334,00	4.046.462.846,00	4,39

Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp35.041.809.180,00 kepada 81 (delapan puluh satu) desa, Dana Desa (DD) senilai Rp61.170.584.000,00 kepada 81 (delapan puluh satu) desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 . Untuk rincian realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat pada Lampiran 5, sedangkan rincian realisasi Dana Desa (DD) dapat dilihat pada Lampiran 6.

6.1.4. SURPLUS/(DEFISIT)

Surplus/Defisit merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.086.122.537,26.

Tabel 6.1. 78  
Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Surplus/Defisit		(43.530.513.354,00)	(1.086.122.537,26)	2,50	1.703.842.831,08	2.789.965.368,34	163,75
1	Pendapatan	545.196.618.255,00	538.464.281.623,51	98,77	531.651.652.684,00	6.812.628.939,51	1,28
2	Belanja	491.359.703.372,00	442.183.632.593,77	89,99	437.028.473.268,92	5.155.159.324,85	1,18
3	Transfer	97.367.428.237,00	97.366.771.567,00	100,00	92.919.336.584,00	4.447.434.983,00	4,79

6.1.5. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp43.767.476.361,03 atau mencapai 100,54% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp43.530.513.354,00. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,64%. Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 79  
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH		43.530.513.354,00	43.767.476.361,03	100,54	41.826.670.522,95	1.940.805.838,08	4,64
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.530.513.354,00	43.767.476.361,03	100,54	41.826.670.522,95	1.940.805.838,08	4,64

6.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp43.767.476.361,03, atau mencapai 100,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp43.530.513.354,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 4,64%. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 80  
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		43.530.513.354,00	43.767.476.361,03	100,54	41.826.670.522,95	1.940.805.838,08	4,64
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.530.513.354,00	43.767.476.361,03	100,54	41.826.670.522,95	1.940.805.838,08	4,64

6.1.5.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp43.767.476.361,03, atau mencapai 100,54% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp43.530.513.354,00. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 81

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenalkan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		43.530.513.354,00	43.767.476.361,03	100,54	41.826.670.522,95	1.940.805.838,08	4,64
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	287.139.371,00	0,00	6.597.364.814,00	(6.310.225.443,00)	(95,65)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	5.024.946.327,00	0,00	0,00	5.024.946.327,00	0,00
3	Penghematan Belanja	43.530.513.354,00	40.111.710.290,03	92,15	35.153.215.177,11	4.958.495.112,92	14,11
4	Sisa Belanja Lainnya	0,00	(1.893.282.634,00)	0,00	50.978.517,00	(1.944.261.151,00)	(3.813,88)
5	Koreksi SILPA	0,00	236.963.007,00	0,00	25.112.014,84	211.850.992,16	843,62

6.1.6. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp43.767.476.361,03.

Tabel 6.1. 82

Pembiayaan Netto

Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
PEMBIAYAAN NETTO		43.530.513.354,00	43.767.476.361,03	100,54	41.826.670.522,95	1.940.805.838,08	4,64
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.530.513.354,00	43.767.476.361,03	100,54	41.826.670.522,95	1.940.805.838,08	4,64
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp42.681.353.823,77. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terjadi penurunan sebesar 1,95%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.1. 83  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	42.681.353.823,77	0,00	43.530.513.354,03	(849.159.530,26)	(1,95)
1	PENDAPATAN DAERAH	545.196.618.255,00	538.464.281.623,51	98,77	531.651.652.684,00	6.812.628.939,51	1,28
2	BELANJA DAERAH	491.359.703.372,00	442.183.632.593,77	89,99	437.028.473.268,92	5.155.159.324,85	1,18
3	TRANSFER	97.367.428.237,00	97.366.771.567,00	100,00	92.919.336.584,00	4.447.434.983,00	4,79
4	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.530.513.354,00)	(1.086.122.537,26)	2,50	1.703.842.831,08	(2.789.965.368,34)	(163,75)
5	PEMBIAYAAN NETTO	43.530.513.354,00	43.767.476.361,03	100,54	41.826.670.522,95	1.940.805.838,08	4,64

6.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Adapun rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut.

6.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp43.530.513.354,03 nilai ini merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022. Saldo tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutupi anggaran defisit Tahun Anggaran 2023 Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 1  
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	43.530.513.354,03	41.801.558.508,11

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp43.530.513.354,03 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 2  
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal		43.530.513.354,03	
1	Pendapatan Daerah	531.651.652.684,00	0,00
2	Belanja Daerah	0,00	437.028.473.268,92
3	Transfer	0,00	92.919.336.584,00
3	Pembiayaan Daerah	41.826.670.522,95	0,00
		573.478.323.206,95	529.947.809.852,92



6.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp43.767.476.361,03 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 3  
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan  
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	43.767.476.361,03	41.826.670.522,95

Nilai Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 adalah sebesar Rp43.767.476.361,03 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 4  
Rincian Saldo Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan			43.767.476.361,03
1	Pelampauan Penerimaan PAD	287.139.371,00	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	5.024.946.327,00	0,00
3	Penghematan Belanja	40.111.710.290,03	0,00
4	Sisa Belanja Lainnya	(1.893.282.634,00)	0,00
5	Koreksi SiLPA	236.963.007,00	0,00
		43.767.476.361,03	0,00

1. Pelampauan Penerimaan PAD
- a. Pelampauan Penerimaan PAD – Pajak Daerah
- i. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel Sebesar Rp106.250,00
- ii. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran Sebesar Rp138.913.157,00
- iii. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan Sebesar Rp450.000,00

- iv. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame Sebesar Rp8.832.875,00
- v. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan Sebesar Rp209.002.760,00
- vi. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet Sebesar Rp350.000,00
- vii. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebesar (Rp329.827.090,00)
- viii. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Sebesar (Rp17.383.696,00)
- ix. Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebesar Rp185.731.325,00
- b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
  - i. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum Sebesar Rp39.635.270,00
  - ii. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha Sebesar (Rp294.248.550,00)
- c. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
  - i. Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro Sebesar Rp4.739.848,00
  - ii. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga Sebesar Rp96.767.173,00
  - iii. Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Sebesar (Rp573.382.073,00)
  - iv. Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Sebesar Rp713.128,00
  - v. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Sebesar Rp766.529.858,00
  - vi. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian Sebesar Rp50.209.136,00
- 2. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
    - i. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sebesar Rp469.354.305,00

- ii. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi Sebesar Rp1.106.715.534,00
- iii. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent Sebesar Rp963.926.393,00
- iv. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty Sebesar Rp6.542.775.511,00
- v. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum Sebesar (Rp372.771.347,00)
- vi. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian Sebesar (Rp163.101.994,00)
- vii. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Sebesar (Rp2.066.809.020,00)
- viii. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Sebesar Rp91.000.000,00
- ix. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebesar (Rp1.209.402.000,00)
- x. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Sebesar (Rp272.920.000,00)



- xi. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sebesar (Rp2.589.594.658,00)
- xii. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB- Jaminan Persalinan Sebesar (Rp41.419.000,00)
- xiii. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Sebesar (Rp206.200.730,00)
- xiv. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Sebesar (Rp65.426.380,00)
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
  - i. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Sebesar Rp2.838.819.713,00
- 3. Penghematan Belanja
  - a. Penghematan Belanja Operasi
    - i. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Sebesar Rp25.481.752.076,03
    - ii. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp4.270.087.850,00
    - iii. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN Sebesar Rp2.259.493.934,00
    - iv. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sebesar Rp2.336.530.164,00
    - v. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD Sebesar Rp1.309.028,00
    - vi. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Sebesar Rp21.855.735,00

- vii. Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  
Sebesar Rp6.480.000,00
- viii. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang Sebesar Rp1.485.359.047,00
- ix. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa Sebesar Rp4.827.625.693,03
- x. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan Sebesar Rp2.917.287.108,00
- xi. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas Sebesar Rp5.285.475.424,00
- xii. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/  
Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sebesar Rp31.649.000,00
- xiii. Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi  
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Sebesar Rp1.548.922.000,00
- xiv. Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS Sebesar Rp435.496.593,00
- xv. Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu Sebesar  
Rp37.200.000,00
- xvi. Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat  
Sebesar Rp16.980.500,00
- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal
  - i. Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah Sebesar Rp158.385.000,00
  - ii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar Sebesar Rp134.748.400,00
  - iii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Sebesar  
Rp4.995.000,00
  - iv. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga  
Sebesar Rp192.870.280,00
  - v. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan  
Pemancar Sebesar Rp112.812.542,00
  - vi. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan  
Sebesar Rp3.642.692.886,00
  - vii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium Sebesar  
Rp344.747.595,00

- viii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer Sebesar Rp1.472.579.076,00
- ix. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga Sebesar Rp25.258.500,00
- x. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Sebesar Rp1.027.752.252,00
- xi. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti Sebesar Rp1.030.635.469,00
- xii. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan Sebesar Rp3.717.690.683,00
- xiii. Penghematan Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air Sebesar Rp995.750.682,00
- xiv. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan Sebesar Rp2.635.435,00
- xv. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Sebesar Rp429.583.333,00
- c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
  - i. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp1.258.086.930,00
- d. Sisa Belanja Transfer
  - a. Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Sebesar Rp81.411.085,00
  - b. Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Sebesar (Rp2.676.934,00)
- 4. Sisa Belanja Lainnya
  - a. Sisa Dana BOS
    - i. Sisa Dana BOS Sebesar (Rp1.267.504.101,00)
  - b. Sisa Dana Kapitasi
    - i. Sisa Dana Kapitasi Sebesar (Rp625.778.533,00)



5. Koreksi SiLPA

a. Lain - Lain

- i. Lain-lain Sebesar Rp236.963.007,00

6.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Saldo Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp42.681.353.823,77 nilai ini merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan – LRA dan Penerimaan Pembiayaan dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 5

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)  
Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	42.681.353.823,77	41.801.558.508,11

Nilai Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 adalah sebesar Rp42.681.353.823,77 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 6

Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		42.681.353.823,77	
1	Pendapatan Daerah	538.464.281.623,51	0,00
2	Belanja Daerah	0,00	442.183.632.593,77
3	Transfer	0,00	97.366.771.567,00
4	Pembiayaan Daerah	43.767.476.361,03	0,00

6.2.4. Lain - Lain

Saldo Lain - Lain Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp236.963.007,00. Lain - Lain Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 7  
Koreksi SILPA Kas Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Lain - Lain	236.963.007,00	25.112.014,84

Nilai Lain - Lain Tahun 2023 adalah sebesar Rp236.963.007,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 8  
Rincian Koreksi SILPA Kas

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
Lain-Lain		236.963.007,00	
1	Kas di Kas Daerah	55.000,00	235.238.556,00
2	Kas di Kas FKTP	0,00	1.244,00
3	Kas BOSP	0,00	1.778.207,00

1. Kas di Kas Daerah
- a. Kelebihan Penyetoran PPH 22 Sebesar Rp54,00

Terjadi Kelebihan Penyetoran PPh 22 akibat kesalahan operator Sekretariat Daerah (Bagian Umum) dalam menginput nominal pajak SP2D No. 17.14/04.0/000569/LS/4.01.0.00. 0.00.01.00/P.07/8/2022.
- b. Selisih Tahun 2022

1) Penyesuaian Kas di Kas Daerah atas Selisih Tahun 2022 yang ternyata telah disetor ke Kas Daerah Di Tahun 2022 dengan STS No. 0001/STS/20911/II/2022 Tgl. 9 Februari 2022 Sebesar Rp45.000,00

2) Penyesuaian Kas di Kas Daerah atas Selisih Tahun 2022 yang ternyata telah disetor ke Kas Daerah Di Tahun 2022 dengan STS No. 001/STS/10211/III/2022 Tgl. 25 Maret 2022 Sebesar Rp10.000,00
- c. Reklas Kas Lainnya

Penyesuaian Kas di Kas Daerah atas Utang PFK BPJS yang tercatat di Kas Lainnya berdasarkan Surat Telaahan BPJS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 13/KK.Boltim/X-06/2023 Tgl. 21 Februari 2023 Sebesar Rp235.238.502,00

d. Penyesuaian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Penyesuaian Kas Dana Kapitasi pada FKTP atas Kelebihan Penyetoran Jasa Giro UPTD Puskesmas Mooat Tahun 2022 ke RKUD dan telah disetorkan kembali oleh pihak Bank ke Rekening Kapitasi di Tahun 2023 Sebesar Rp1.244,00

e. Penyesuaian Kas BOSP

- 1) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri srikandi
- 2) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI SUKAMAJU
- 3) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI LESTARI LIBERIA TIMUR
- 4) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI PULAU NENAS KOTABUNAN
- 5) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Tunas Budi Mulia
- 6) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI RAMAH NUANGAN SELATAN
- 7) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Kartini Motongkad
- 8) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Cahaya Kasih
- 9) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada Tk negeri bukit hijau
- 10) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Unggulan Togid
- 11) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI AL-QUR'AN TUTUYAN 2
- 12) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Siti Miftah
- 13) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK.Negeri Cahaya Bulawan Tobongan
- 14) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK negeri melati pinonobatan
- 15) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI MULIA
- 16) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Fatmawati
- 17) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Bina Insani
- 18) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Flamboyan
- 19) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Ruth
- 20) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Dewi Sartika Paret
- 21) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri beringin tangaton
- 22) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI MO PANDROY GUAAN
- 23) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI MAWAR



- 24) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI PEMBINA TOMBOLIKAT
- 25) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK Negeri Mutiara Purworejo Timur
- 26) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI MELATIH INDAH PARET
- 27) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI SAROJA
- 28) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada TK NEGERI BUDI LUHUR
- 29) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada SPNF SKB TUTUYAN
- 30) Pengakuan Saldo Kas Dana BOSP pada SPNF SKB MODAYAG
- 31) Koreksi - atas saldo minus Kas dana BOS SMP St. John Paul II Guaan (swasta) akibat dari pengakuan belanja yang seharusnya tidak diakui karena menggunakan saldo Kas Tunai tahun sebelumnya yang tidak tercatat pada LKPD Audited Tahun 2022

6.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp42.681.353.823,77. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 9  
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	42.681.353.823,77	43.530.513.354,03

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp42.681.353.823,77 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 10  
Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		42.681.353.823,77	
1	Pendapatan Daerah	538.464.281.623,51	0,00
2	Belanja Daerah	0,00	442.183.632.593,77
3	Transfer	0,00	97.366.771.567,00
4	Pembiayaan Daerah	43.767.476.361,03	0,00
		582.231.757.984,54	539.550.404.160,77

6.3. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Neraca terdiri dari dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh entitas tersebut, seperti kas, piutang, inventaris, investasi, dan aset tetap. Sedangkan pasiva adalah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh entitas tersebut, seperti hutang usaha, hutang pajak, modal saham, dan laba ditahan.

Tabel 6.3. 1  
Neraca Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Neraca			
1	Aset	885.317.912.139,86	902.066.820.101,89
2	Kewajiban	8.606.470.394,63	8.016.036.283,38
3	Ekuitas	876.711.441.745,23	894.050.783.818,51

6.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah, serta dapat diukur dalam satuan uang. Berikut diuraikan Aset milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp885.317.912.139,86, Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset di Tahun 2022 sebesar Rp902.066.820.101,89, terjadi penurunan sebesar 1,86% atau sebesar Rp16.748.907.962,03.

Tabel 6.3. 2  
Aset Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Aset		885.317.912.139,86	902.066.820.101,89
1	Aset Lancar	62.052.067.785,97	62.060.730.906,73

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
2	Investasi	8.001.400.000,00	8.001.400.000,00
3	Aset Tetap	814.416.736.614,89	827.315.908.410,16
4	Aset Lainnya	847.707.739,00	4.688.780.785,00

6.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp62.052.067.785,97 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar di Tahun 2022 sebesar Rp62.060.730.906,73, terjadi penurunan sebesar 0,01% atau sebesar Rp8.663.120,76.

Tabel 6.3. 3

Aset Lancar Tahun 2023 - 20222

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
ASET LANCAR	62.052.067.785,97	62.060.730.906,73

Dari tabel diatas Aset Lancar pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian, berikut rinciannya:

6.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil, dan sumber pendapatan lainnya. Kas daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Nilai Kas Di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp41.489.237.239,23, dana ini terdapat pada Rekening Umum Daerah, Dibandingkan dengan nilai Kas Di Kas Daerah di Tahun 2022 sebesar Rp43.442.169.605,11, terjadi penurunan sebesar 4,50% atau sebesar Rp1.952.932.365,88.



Rincian nilai Kas Di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 4  
Kas di Kas Daerah Tahun 2023 - 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Kas di Kas Daerah		41.489.237.239,23	43.442.169.605,11
1	Bank SuluGo - 027 01 12 0000011	41.489.227.171,39	43.442.159.537,27
2	Deposito BRI - 003601001791302	10.067,84	10.067,84

Berdasarkan tabel di atas terdapat Rekening Deposito Daerah pada Bank BRI yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo sebesar Rp10.067,84 nilai tersebut merupakan jasa giro pada rekening tersebut.

Per 31 desember 2023 terjadi selisih antara Buku Pembantu Kas Daerah (BKU) dengan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebesar Rp92.771.808,00 nilai yang disebabkan oleh beberapa kejadian:

- A. Dobel Pencairan 3 (tiga) SP2D pada RSUD BOLAANG MONGONDOW TIMUR
- o SP2D no: 04.0/000074/LS/1.02.0.00.0.00.01.0011/P.05/12/2023 pada tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp58.096.978,00;
  - o SP2D no: 04.0/000075/LS/1.02.0.00.0.00.01.0011/P.05/12/2023 pada tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp3.563.969,00;
  - o SP2D no: 04.0/000076/LS/1.02.0.00.0.00.01.0011/P.05/12/2023 pada tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp30.246.422.00

Dana tersebut telah dikembalikan ke rekening kas umum daerah (RKUD) pada tanggal 03 Januari 2024 dengan bukti transfer BI-FAST 00003346600791008; TRF DEST 000002901002001360 dan TRF DEST 000002901002001360.

- B. Kelebihan Pendebetan Pihak Bank
- o SP2D no: 04.0/000139/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 pada tanggal 4 Desember 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan telah

dikembalikan ke rekening kas umum daerah (RKUD) pada tanggal 09 Februari 2024 dengan no sts: 0016/STS/5.02.0.00.0.00.01.0000/II/2024 sebesar Rp864.439,00. Kelebihan pendebitan pihak bank ini terdapat pada setoran IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai yang seharusnya dilakukan pendebitan berdasarkan kode billing 702312040159932 senilai Rp6.989.897,00 oleh pihak bank di debet dengan kode billing 702312040159933 milik Pemerintah Daerah lain senilai Rp7.854.336,00 terdapat selisih kelebihan pendebitan sebesar Rp864.439,00. Untuk kelebihan pendebitan dan setoran IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dipindahbukukan pada tahun 2024.

Terkait terjadinya kelebihan pendebitan oleh pihak bank untuk tahun 2024 pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan berkoordinasi dengan pihak Bank SulutGo serta melakukan proses rekonsiliasi sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan.

- C. Reklasifikasi Kas lainnya
- o Reklasifikasi Kas di kas lainnya sebesar Rp251.433.794,00 ke utang perhitungan pihak ketiga (PFK).

Adapun selisih antara buku pembantu kas daerah (BKU) dan rekening umum kas daerah (RKUD) dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 6.3. 5  
Rincian Selisih Buku Pembantu Kas Daerah (BKU)  
dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

No	Uraian	Buku Pembantu Kas Daerah (BKU)	Rekening Umum Kas Daerah (RKUD)
	Saldo Setelah Rekonsiliasi	41.489.227.171,39	41.489.227.171,39
	Saldo Per 31 Desember 2022	41.489.227.171,39	41.396.455.363,39
1	Dobel Pencairan SP2D:	0,00	91.907.369,00
	04.0/000074/LS/1.02.0.00.0.00.01.0011/P.05/12/2023	0,00	58.096.978,00
	04.0/000075/LS/1.02.0.00.0.00.01.0011/P.05/12/2023	0,00	3.563.969,00
	04.0/000076/LS/1.02.0.00.0.00.01.0011/P.05/12/2023	0,00	30.246.422,00
2	Kelebihan Pendebitan Pihak BANK	0,00	864.439,00
	04.0/000139/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023	0,00	864.439,00

6.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah dana yang diterima dan disimpan oleh bendahara penerimaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan.

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, nilai tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp38.019.915,00, terjadi penurunan sebesar 100% atau sebesar Rp38.019.915,00. Rincian nilai Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 6  
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023–2022

No	U r a l a n	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	38.019.915,00

6.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan dana yang dimiliki oleh bendahara pengeluaran yang dipergunakan untuk keperluan operasional instansi. Kas tersebut digunakan untuk membayar berbagai macam pengeluaran yang diperlukan.

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilainya di Tahun 2022 sebesar Rp4.342.806,00, terjadi penurunan sebesar 100% atau sebesar Rp4.342.806,00. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 7  
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023-2022

No	U r a l a n	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	4.342.806,00



6.3.1.1.4. Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP adalah seluruh dana kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BOSP yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BOSP.

Nilai Kas Dana BOSP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.900.117,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai di Tahun 2022 sebesar Rp10.360.201,00, terjadi penurunan sebesar 43,05% atau sebesar Rp4.460.084,00.

Rincian nilai Kas Dana BOSP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 8  
Kas Dana BOSP Tahun 2023 - 2022

No	U r a l a n	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Kas Dana BOSP		5.900.117,00	10.360.201,00
1	Kas Dana BOS	4.139.910,00	10.360.201,00
2	Kas Dana BOP PAUD	676.943,00	0,00
3	Kas Dana BOP Kesenjangan	1.083.264,00	0,00

Dari tabel diatas Kas Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.3. 9  
Rincian Kas Dana BOS Tahun 2023 – 2022

No	Sekolah	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Kas Dana BOS		4.139.910,00	10.360.201,00
1	SD Negeri 2 Moyongkota Baru	156.492,00	156.492,00
2	SD Negeri 1 Modayag	0,00	177.397,00
3	SD Negeri 1 Modayag Barat	0,00	451,00
4	SD Negeri 1 Purworejo Timur	4.312,00	4.312,00
5	SD Negeri 1 Buyat 2	112.154,00	112.154,00
6	SD Negeri 1 Bulawan 2	18,00	672.241,00
7	SD Negeri 1 Tombolikot	0,00	4.800.000,00

No	Sekolah	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
8	SD Negeri 1 Dodap Pantai	3.650.000,00	60.744,00
9	SD Negeri 1 Loyow	60.744,00	50,00
10	SD Negeri 1 Idmun	50,00	0,00
11	SMP Negeri 1 Tutuyan	0,00	1.940.175,00
12	SMP Negeri 2 Tutuyan	0,00	2.277.445,00
13	SMP Negeri Satap Matabulu	65.477,00	65.477,00
14	SMP Negeri Satap Atoga	41.605,00	44.205,00
15	SMP Satap Bai	48.909,00	48.909,00
16	SMP Satap Badaro	149,00	149,00

Tabel 6.3. 10  
Kas Dana BOP PAUD Tahun 2023-2022

No	Sekolah	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Kas Dana BOP PAUD		676.943,00	0,00
1	TK Negeri Srikandi	3.099,00	0,00
2	TK Negeri Sukamaju	2.906,00	0,00
3	TK Negeri Lestari	19.230,00	0,00
4	TK Negeri Pulau Nenas	124.158,00	0,00
5	TK Negeri Tunas Budi Mulia	4.122,00	0,00
6	TK Negeri Ramah	1.400,00	0,00
7	TK Negeri Kartini	3.866,00	0,00
8	TK Negeri Cahaya Kasih	7.412,00	0,00
9	TK Negeri Bukit Hijau	1.980,00	0,00
10	TK Negeri Unggulan	3.492,00	0,00
11	TK Negeri Al-Qur'an	3.412,00	0,00
12	TK Negeri Siti Miftah	1.938,00	0,00
13	TK Negeri Cahaya Bulawan	2.620,00	0,00
14	TK Negeri Melati	2.652,00	0,00
15	TK Negeri Mulia	1.071,00	0,00
16	TK Negeri Fatmawati	22.153,00	0,00
17	TK Negeri Bina Insani	4.563,00	0,00
18	TK Negeri Flamboyan	2.132,00	0,00
19	TK Negeri Ruth	1.892,00	0,00

No	Sekolah	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
20	TK Negeri Dewi Sartika	2.691,00	0,00
21	TK Negeri Beringin	2.842,00	0,00
22	TK Negeri Mo Pandoy	2.967,00	0,00
23	TK Negeri Mawar	2.150,00	0,00
24	TK Negeri Pembina	3.327,00	0,00
25	TK Negeri Mutiara	41.326,00	0,00
26	TK Negeri Melati Indah	1.350,00	0,00
27	TK Negeri Seroja	2.759,00	0,00
28	TK Negeri Budi Luhur	403.433,00	0,00

Tabel 6.3. 11

Kas Dana BOP Kesetaraan Tahun 2023-2022

No	Sekolah	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Kas Dana BOP Kesetaraan		1.083.264,00	0,00
1	SPNF SKB Tutuyan	45.888,00	0,00
2	SPNF SKB Modayag	1.037.376,00	0,00

6.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah seluruh dana kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Puskesmas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional Puskesmas atas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nilai Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp85.529.362,54 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Kas Dana Kapitasi Pada FKTP di Tahun 2022 sebesar Rp35.620.826,92, terjadi peningkatan sebesar 140,11% atau sebesar Rp49.908.535,62.

Tabel 6.3. 12

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		85.529.362,54	35.620.826,92
1	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	85.529.362.54	35.620.826,92



Rincian nilai Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: nilai

Tabel 6.3. 13  
Rincian Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Tahun 2023 – 2022

No	UPTD PUSKESMAS	Nomor Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022
			Rp	Rp
Kas Dana Kapitasi pada FKTP			85.529.362,54	35.620.826,92
1	UPTD Puskesmas Kotabunan (JKN)	BRI (003601001786307)	26.147.301,37	333.678,37
2	UPTD Puskesmas Tutuyan (JKN)	BRI (003601001785301)	2.067.594,00	574.348,00
3	UPTD Puskesmas Nuangan (JKN)	BRI (003601001783309)	37.599.389,62	1.546.671,84
4	UPTD Puskesmas Modayag (JKN)	BRI (003601001790306)	2.927.144,03	212.092,03
5	UPTD Puskesmas Modayag Barat (JKN)	BRI (003601001788309)	236.362,00	7.233.085,00
6	UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan (JKN)	BRI (003601001787303)	2.131.600,52	92.580,68
7	UPTD Puskesmas Mooat (JKN)	BRI (003601001789305)	14.419.971,00	25.628.371,00

6.3.1.1.6. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas adalah seluruh dana kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BOK Puskesmas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional Puskesmas atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang ditujukan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai. Nilai Kas di Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.100.687.105,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Kas Dana Kapitasi Pada FKTP di Tahun 2022 sebesar Rp0,00, terjadi peningkatan sebesar 100% atau sebesar Rp1.100.687.105,00

Tabel 6.3. 14  
Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2023 – 2022

No	UPTD PUSKESMAS	Nomor Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022
			Rp	Rp
Kas di Bendahara FKTP BOK			1.100.687.105,00	0,00
1	UPTD Puskesmas Kotabunan	BNI ( 1590043146 )	185.358.513,00	0,00
2	UPTD Puskesmas Tutuyan	BNI ( 1590043157 )	223.034.093,00	0,00
3	UPTD Puskesmas Nuangan	BNI ( 1590043124 )	7.449.958,00	0,00
4	UPTD Puskesmas Modayag	BNI ( 1590043168 )	220.078.367,00	0,00
5	UPTD Puskesmas Modayag Barat	BNI ( 1590043135 )	99.905.113,00	0,00
6	UPTD Puskesmas Buyat	BNI ( 1590043102 )	5.574.242,00	0,00
7	UPTD Puskesmas Mooat	BNI ( 1590043099 )	140.052.425,00	0,00
8	UPTD Puskesmas Motongkad	BNI ( 1590043113 )	219.234.394,00	0,00

6.3.1.1.7. Kas Lainnya

Nilai Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp39.338.062,63

Rincian Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 15  
Rincian Kas Lainnya Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Kas Lainnya		39.338.062,63	508.837.118,11
1	UPTD Puskesmas Motongkad (JKN)	337.357,63	99.801,11
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.928.705,00	22.268.992,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	234.400.000,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.072.000,00	0,00
5	Kas Lainnya di BUD	0,00	252.068.325,00

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan tentang nilai Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

1) Koreksi Bertambah Kas Lainnya

- Penyesuaian Kas Lainnya (Bukan Rekening Kapitasi) PKM Motongkad atas Kelebihan Transfer dana Kapitasi dari PKM Nuangan Sebesar Rp237.556,52
- Pengakuan Kas Lainnya atas uang yang masih dibendahara pengeluaran secara tunai per 31 Desember 2023, dan baru diserahkan ke penerima di Tahun 2024 Sebesar Rp4.072.000,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Bongkudai Baru Utara Sebesar Rp3.629.194,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Buyat 2 Sebesar Rp1.385.021,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 23 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Buyat 2 Sebesar Rp12.280,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Jikobelanga Sebesar Rp1.223.823,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Lanud Sebesar Rp576.952,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 21 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Lanud Sebesar Rp142.500,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 23 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Lanud Sebesar Rp514.320,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Modayag Sebesar Rp2.134.407,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 21 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Modayag Sebesar Rp180.000,00



- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 23 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Modayag Sebesar Rp227.850,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Purworejo Timur Sebesar Rp4.803.018,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 21 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Purworejo Timur Sebesar Rp957.000,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 23 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SDN 1 Purworejo Timur Sebesar Rp346.660,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Nuangan Sebesar Rp4.457.327,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 21 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Nuangan Sebesar Rp100.000,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 23 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Nuangan Sebesar Rp98.100,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SMP Negeri Satap Matabulu Sebesar Rp3.822.208,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 21 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SMP Negeri Satap Matabulu Sebesar Rp1.135.000,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPh 23 per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SMP Negeri Satap Matabulu Sebesar Rp895.200,00
- Pengakuan Kas Lainnya atas Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 yang masih di Bendahara BOS pada SMP Satap Molobog Sebesar Rp594.659,00

2) Koreksi Berkurang Kas Lainnya

- Penyesuaian Kas Lainnya atas Uang Pengganti Pulsa dan/atau Operasional Lainnya Pendamping Keluarga Tahun 2022 pada Dinas PPKB yang baru disalurkan di Tahun 2023 Sebesar Rp234.400.000,00

- Penyesuaian Kas di Kas Daerah atas Utang PFK BPJS yang tercatat di Kas Lainnya berdasarkan Surat Telaahan BPJS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 13/KK.Boltim/X-06/2023 Tgl. 21 Februari 2023 Sebesar Rp251.433.794,00
- Penyesuaian Kas Lainnya atas Pajak PPh 22 Tahun 2022 yang baru disetorkan di Tahun 2023 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Sebesar Rp51.182,00
- Penyesuaian Kas Lainnya atas Pajak PPh 22 Tahun 2022 yang baru disetorkan di Tahun 2023 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Sebesar Rp24.961,00
- Penyesuaian Kas Lainnya atas Pajak PPN Pusat Tahun 2022 yang baru disetorkan di Tahun 2023 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Sebesar Rp375.338,00
- Penyesuaian Kas Lainnya atas Pajak PPN Pusat Tahun 2022 yang baru disetorkan di Tahun 2023 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Sebesar Rp183.050,00
- Penyesuaian Kas Lainnya (Bukan Dana BOS) SDN 1 Buyat yang telah disetorkan ke RKUD di Tahun 2023 Sebesar Rp3.670.722,00
- Koreksi - temuan pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD TA.2022 atas Saldo Kas Tunai Dana BOS Kinerja SMP N 1 Modayag per 31 Desember 2022 yang merupakan dana untuk kegiatan MGMP dan Project Kearifan Lokal Tahun 2022 yang baru dilaksanakan di Tahun Sebesar Rp10.905.084,00

#### 6.3.1.1.8. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh wajib bayar.

Nilai Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp519.155.527,81 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Piutang Pajak Daerah di Tahun 2022 sebesar Rp611.636.288,00, terjadi penurunan sebesar 15,12% atau sebesar Rp92.480.760,19.

Rincian nilai Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 16  
Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Piutang Pajak Daerah		519.155.527,81	611.636.288,00
1	Piutang Pajak Reklame	18.489.250,00	18.489.250,00
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	237.582.383,00	411.026.360,00
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	58.610.076,81	30.259.500,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	204.473.818,00	151.861.178,00

Tabel 6.3. 17  
Mutasi Penambahan (Pengurangan) Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2022	Mutasi Penambahan (Pengurangan)	Tahun 2023
		Rp	Rp	Rp
Piutang Pajak Daerah		611.636.288,00	254.407.193,81	519.155.527,81
1	Piutang Pajak Reklame	18.489.250,00	0,00	18.489.250,00
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	411.026.360,00	173.443.977,00	237.582.383,00
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.259.500,00	28.350.576,81	58.610.076,81
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	151.861.178,00	52.612.640,00	204.473.818,00

Dari tabel diatas dapat dijabarkan mutasi penambahan (pengurangan) piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

- 1) Piutang Pajak Penerangan Jalan



- a. Penerimaan Piutang Tahun 2022 Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp204.229.072,00 atas Pendapatan Bulan November Tahun 2022
  - b. Penerimaan Piutang Tahun 2022 Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp206.797.288,00 atas Pendapatan Bulan Desember Tahun 2022
  - c. Pengakuan Piutang Tahun 2023 Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp237.582.383,00
- 2) Piutang Pajak Mineral Logam dan Batuan
- a. Pengakuan Piutang Tahun 2023 Pajak Mineral Logam dan Batuan sebesar Rp28.350.576,81
- 3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- a. Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp316.200,00 a/n Sinta Setiawan
  - b. Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp510.000,00 a/n Deki Lando
  - c. Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp674.475,00 a/n PT.Telkom
  - d. Pengakuan Piutang 2023 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Sebesar Rp54.113.315,00

#### 6.3.1.1.9. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Saldo Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tidak tertagih setelah adanya penetapan Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.260.040.078,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Tahun 2022 sebesar Rp1.409.788.093,00, terjadi penurunan sebesar 10,62% atau sebesar Rp149.748.015,00.

Dasar pencatatan besaran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Tahun 2023 berdasarkan surat posisi modal disetor setelah RUPS tanggal 19 Februari 2024 no:085/A/AKT/DIR/II/2024.

Tabel 6.3. 18  
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.260.040.078,00	1.409.788.093,00

6.3.1.1.10. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah Adalah piutang atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan 31 Desember 2023, nilai Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.485.301.387,35 dengan jumlah penetapan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 145 tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp15.678.793.633,00 yang terealisasi tahun 2023 sebesar Rp6.193.492.264,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Piutang Transfer Antar Daerah di Tahun 2022 sebesar Rp9.992.403.561,00, terjadi penurunan sebesar 5,07% atau sebesar Rp507.102.173,65,00

Rincian nilai Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 19  
Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Piutang Bagi Hasil Pajak		9.485.301.387,35	9.992.403.561,00
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.162.066.801,91	2.467.003.651,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.757.204.774,40	1.703.259.159,00

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.512.621.924,20	5.745.599.532,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	53.407.886,84	76.541.219,00

6.3.1.1.11. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa datang. Dasar perhitungan penyisihan piutang adalah Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nilai Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp147.317.838,51 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Penyisihan Piutang di Tahun 2022 sebesar Rp150.315.753,20, terjadi penurunan sebesar 1,99% atau sebesar Rp2.997.914,69.

Berikut rincian nilai Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 20  
Penyisihan Piutang Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
PENYISIHAN PIUTANG	(147.317.838,51)	(150.315.753,20)

Dari tabel diatas Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian, berikut rinciannya:

Tabel 6.3. 21  
Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Penyisihan Piutang Pendapatan		(147.317.838,51)	(150.315.753,20)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(99.891.331,57)	(100.353.735,37)
2	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(47.426.506,94)	(49.962.017,83)



1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah sebesar Rp99.891.331,57.

Tabel 6.3. 22  
Klasifikasi Umur Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun Pengakuan Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 31 Des 2023
Piutang Pajak Daerah				
1 Piutang Pajak Reklame				18.489.250,00
18.489.250,00	2016	7 tahun	Macet	18.489.250,00
2 Piutang Pajak Penerangan Jalan				1.187.911,92
237.582.383,00	2023	0 tahun	Kualitas Lancar	1.187.911,92
3 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				28.821.502,88
10.860.000,00	2014	9 tahun	Macet	10.860.000,00
16.240.000,00	2015	8 tahun	Macet	16.240.000,00
3.159.500,00	2018	5 tahun	Diragukan	1.579.750,00
28.350.576,81	2023	0 tahun	Kualitas Lancar	141.752,88
4 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)				51.392.666,77
3.994.138,00	2014	9 tahun	Macet	3.994.138,00
1.206.820,00	2017	6 tahun	Macet	1.206.820,00
86.879.887,00	2018	5 tahun	Macet	43.409.943,50
23.366.320,00	2020	3 tahun	Kurang Lancar	2.336.632,00
34.913.338,00	2022	1 tahun	Kualitas Lancar	174.566,69
54.113.315,00	2023	0 tahun	Kualitas Lancar	270.566,58

Uraian			Tahun Pengakuan Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 31 Des 2023
Piutang Transfer Antar Daerah						47.426.506,94
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor					
		2.162.066.801,91	2023	0 tahun	Kualitas Lancar	10.810.334,01
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					
		1.757.204.774,40	2023	0 tahun	Kualitas Lancar	8.786.023,87
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
		5.512.621.924,20	2023	0 tahun	Kualitas Lancar	27.563.109,62
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan					
		53.407.886,84	2023	0 tahun	Kualitas Lancar	267.039,43

Setelah proses penyisihan pada piutang pajak daerah yang tak tertagih dan koreksi tahun berjalan maka didapat nilai piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3. 23  
Piutang Pajak Daerah Neto Tahun 2023

Piutang Pajak Daerah	Penyisihan	Piutang Neto
519.155.527,81	(99.891.331,57)	419.264.196,24

2. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah sebesar Rp47.426.506,94 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 24  
Klasifikasi Umur Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun Pengakuan Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 31 Des 2023
Piutang Transfer Antar Daerah				49.962.017,81
1 Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
2.467.003.651,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	12.335.018,26
2 Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
1.703.259.159,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	8.516.295,80
3 Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
5.745.599.532,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	28.727.997,66
4 Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
76.541.219,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	382.706,10

Tabel 6.3. 25  
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(47.426.506,94)	(49.962.017,83)
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(47.426.506,94)	(49.962.017,83)

Setelah proses penyisihan pada piutang transfer antar daerah yang tak tertagih dan koreksi tahun berjalan maka didapat nilai piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6.3. 26  
Piutang Piutang Transfer Antar Daerah Neto Tahun 2023

Piutang Transfer Antara Daerah	Penyisihan	Piutang Neto
9.485.301.387,35	(47.426.506,94)	9.437.874.880,41

6.3.1.1.12. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan. Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diantaranya adalah sewa dibayar dimuka Gedung Perkantoran, Gedung Asrama dan sewa rumah dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Nilai Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp151.115.513,48 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Beban Dibayar Dimuka di Tahun 2022 sebesar Rp167.408.219,17, terjadi penurunan sebesar 9,73% atau sebesar Rp16.292.705,69.

Tabel 6.3. 27  
Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	151.115.513,48	167.408.219,17

Rincian nilai Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 28  
Rincian Beban Dibayar Dimuka  
Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Beban Dibayar Dimuka		151.115.513,48	167.408.219,17
1	UPTD Perempuan dan Anak	7.683.923,71	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	393.442,62	295.890,41
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	2.410.958,90

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
4	Bagian Umum	143.038.147,15	161.928.767,12
5	Inspektorat	0,00	2.772.602,74

6.3.1.1.13. Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah piutang yang tidak terkait dengan penjualan barang atau jasa. Piutang ini bisa terbentuk dari berbagai sumber, seperti pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, deposito jangka pendek, dan pembayaran yang belum diterima dari pihak lain terkait dengan transaksi lainnya. Di Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki piutang lainnya berupa uang muka pengadaan barang/jasa.

Rincian nilai Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 29  
Piutang Lainnya Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
PIUTANG LAINNYA	36.455.906,61	174.111.111,11

Nilai piutang lainnya di Tahun 2023 merupakan Nilai Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 rincian nilai Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 30  
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		36.455.906,61	174.111.111,11
1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	36.455.906,61	174.111.111,11

Nilai uang muka pengadaan barang/jasa pada tabel diatas terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp36.455.906,61 yang merupakan belanja bantuan sosial berupa belanja Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Modayag III sebanyak 7 (tujuh) unit yang per 31 Desember 2022 hanya terselesaikan sebanyak 5 (lima) unit, Per 31 Desember 2023 bertambah 1 (satu) unit yang terselesaikan dan 1 (satu) unit lagi sudah terealisasi sebesar 90,07%, aktifitas ini menyebabkan timbulnya uang muka pengadaan barang /jasa.

6.3.1.1.14. **Persediaan**

Persediaan adalah persediaan yang dikuasai oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023. Persediaan bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.026.625.324,83 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Persediaan di Tahun 2022 sebesar Rp5.792.664.823,25, terjadi peningkatan sebesar 38,57% atau sebesar Rp2.233.960.501,58.

Rincian nilai Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 31  
Persediaan Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
PERSEDIAAN	8.026.625.324,83	5.792.664.823,25

Rincian nilai persedian masing – masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 11. Persediaan Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan barang habis pakai yang dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 6.3. 32  
Rincian Barang Pakai Habis Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Barang Pakai Habis		8.026.625.324,83	5.792.664.823,25
1	Bahan	2.149.880.294,15	82.708.419,50
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	88.668.288,00	151.405.050,79
3	Obat-obatan	5.436.762.742,68	5.441.950.712,96
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	351.314.000,00	116.600.640,00

1. Bahan

Saldo Persediaan Bahan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.149.880.294,15, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 33  
Bahan Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Bahan		2.149.880.294,15	82.708.419,50
1	Bahan Kimia	34.866.419,50	59.728.819,50
2	Bahan Baku	116.450.000,00	0,00
3	Barang Dalam Proses	1.994.311.714,65	0,00
4	Bahan/Bibit Tanaman	1.454.960,00	22.979.600,00
5	Bahan Lainnya	2.797.200,00	0,00

2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp88.668.288,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 34  
Rincian Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		88.668.288,00	151.405.050,79
1	Alat Tulis Kantor	20.419.170,00	27.032.728,79
2	Kertas dan Cover	9.743.240,00	15.031.745,00
3	Bahan Cetak	32.088.600,00	10.947.990,00
4	Benda Pos	929.640,00	4.191.888,00
5	Bahan Komputer	25.487.638,00	83.884.109,00
6	Perabot Kantor	0,00	10.316.590,00

3. Obat-obatan

Saldo Persediaan Obat-Obatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.436.762.742,68, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 35  
Obat-Obatan  
Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Obat-obatan		5.436.762.742,68	5.441.950.712,96
1	Obat	2.395.922.902,87	3.230.728.122,61
2	Obat-obatan Lainnya	3.040.839.839,81	2.211.222.590,35

Rincian obat dan obat-obatan lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 dapat dirincian sebagai berikut:

1. Obat

Tabel 6.3. 36  
Rincian Obat Tahun 2023-2022

No	Unit Organisasi	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Obat		2.395.922.902,87	3.230.728.122,61
1	Dinas Kesehatan	1.687.644.412,76	2.601.977.723,03
2	UPTD Puskesmas Kotabunan	40.076.610,59	60.779.760,89
3	UPTD Puskesmas Tutuyan	107.452.865,29	177.868.172,65
4	UPTD Puskesmas Nuangan	63.707.568,58	70.075.252,41
5	UPTD Puskesmas Modayag	36.176.958,41	71.976.462,59
6	UPTD Puskesmas Modayag Barat	36.138.372,53	34.127.492,25
7	UPTD Puskesmas Mooat	51.531.682,60	44.020.571,77
8	UPTD Puskesmas Buyat	78.460.965,21	67.279.501,17
9	UPTD Puskesmas Motongkad	45.777.140,35	63.258.933,85
10	RSUD Bolaang Mongondow Timur	206.349.705,55	0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42.606.621,00	39.364.252,00

Dari data di atas terdapat koreksi pembentu nilai obat di Tahun 2023 berikut rinciannya

- Kurang Catat Persediaan - Obat pada UPTD Puskesmas Nuangan Sebesar Rp5.105.515,00
- Lebih Catat Persediaan - Obat pada UPTD Puskesmas Tutuyan Sebesar Rp6.443.550,00
- Kurang Catat Persediaan - Obat pada UPTD Puskesmas Motongkad Sebesar Rp485.500,00
- Lebih Catat Persediaan - Obat pada UPTD Puskesmas Motongkad Sebesar Rp6.606.589,95

2. Obat-obatan lainnya

Tabel 6.3. 37  
Rincian Obat-obatan lainnya Tahun 2023-2022

No	Unit Organisasi	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Obat-obat Lainnya		3.040.839.839,81	2.211.222.590,35
1	Dinas Kesehatan	2.577.527.449,69	1.952.414.293,42
2	UPTD Puskesmas Kotabunan	37.537.492,86	32.558.270,12



No	Unit Organisasi	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
3	UPTD Puskesmas Tutuyan	47.470.595,95	37.760.555,83
4	UPTD Puskesmas Nuangan	67.381.977,53	47.224.286,41
5	UPTD Puskesmas Modayag	47.050.607,67	66.994.533,32
6	UPTD Puskesmas Modayag Barat	16.375.578,49	15.386.910,88
7	UPTD Puskesmas Mooat	18.558.336,21	24.359.169,23
8	UPTD Puskesmas Buyat	26.030.000,52	14.296.448,22
9	UPTD Puskesmas Motongkad	15.042.692,40	12.304.772,92
10	RSUD Bolaang Mongondow Timur	119.358.408,49	0,00
11	Dinas Pertanian	68.506.700,00	7.923.350,00

Dari data di atas terdapat koreksi pembentu nilai obat-obatan lainnya di Tahun 2023 berikut rinciannya

- Lebih Catat Persediaan - Obat-obatan Lainnya (BMHP) pada UPTD Puskesmas Nuangan Sebesar Rp2.641.768,00
- Lebih Catat Persediaan - Obat-obatan Lainnya (BMHP) pada UPTD Puskesmas Tutuyan Sebesar Rp384.560,00
- Lebih Catat Persediaan - Obat-obatan Lainnya (BMHP) pada RSUD Bolaang Mongondow Timur Sebesar Rp384.560,00

4. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp351.314.000,00 barang tersebut merupakan objek barang yang harusnya telah di serahkan ke Masyarakat pada tahun 2023 namun sampai dengan 31 Desember 2023 barang tersebut masih menjadi objek persediaan pada dinas terkait.

Tabel 6.3. 38  
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan  
Tahun 2023 – 2022

No	U r a l a n	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	351.314.000,00	116.600.640,00
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	351.314.000,00	116.600.640,00

### 6.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka Panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka Panjang sendiri adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bunga, deviden dan royalti yang jangka waktunya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

#### 6.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.001.400.000,00,

Penilaian investasi jangka Panjang permanen pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengacu pada kebijakan akuntansi dimana investasi jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengacu pada Surat Keputusan Bupati nomor: 132 Tahun 2016 tentang penetapan nomor rekening dana setoran modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT Bank SulutGo sebesar Rp1.000.000.000,00, dan Surat Keputusan Bupati nomor : 58 Tahun 2017 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT Bank SulutGo Tahun anggaran 2017 sebesar Rp7.000.000.000,00. Jumlah penyertaan modal tersebut terdiri dari jumlah penyertaan modal Rp1.000.000,00 pada tahun 2013; saham bonus sebesar Rp100.000,00 di tahun 2014 dan 2015; penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kapt. deviden sebesar Rp100.000,00 pada tahun 2016; penyertaan modal sebesar Rp7.000.000.000,00 pada tahun 2017; serta saham bonus sebesar Rp100.000,00 pada tahun 2019.

Berikut rincian nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 39  
Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	8.001.400.000,00	8.001.400.000,00

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki investasi jangka Panjang permanen berupa penyertaan modal di PT. Bank Sulut-Go dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8.001.400.000,00 sesuai dengan Akta Notaris No 72 tanggal 22 Mei 2015 mengenai perubahan nama Perseroan dan Akta Notaris No 16 tanggal 12 Oktober 2015 mengenai perubahan modal dasar Perseroan PT. Bank Sulut-Go.

6.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp814.416.736.614,89 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 40  
Aset Tetap  
Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
ASET TETAP	814.416.736.614,89	827.315.908.410,16

Dari Tabel di atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 6.3. 41  
Rincian Aset Tetap  
Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
ASET TETAP		814.416.736.614,89	827.315.908.410,16
1	Tanah	221.213.141.638,00	220.599.056.138,00
2	Peralatan dan Mesin	321.031.551.189,70	309.256.778.883,70
3	Gedung dan Bangunan	466.517.138.308,89	448.316.354.484,89
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.015.589.520.277,00	933.563.567.808,00
5	Aset Tetap Lainnya	20.180.864.769,00	20.065.971.269,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.693.533.899,00	23.114.812.773,27
7	Akumulasi Penyusutan	(1.239.809.013.466,70)	(1.127.600.632.946,70)

Rincian Aset Tetap masin-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 11.

6.3.1.3.1. Tanah

Aset tetap tanah adalah properti tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan fasilitas umum, infrastruktur, atau pengembangan kawasan perkotaan. Tanah pemerintah daerah dapat berupa lahan kosong, lahan terbangun, atau tanah yang sedang dalam tahap pengembangan.

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp 221.213.141.638,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah di Tahun 2022 sebesar Rp220.599.056.138,00, terjadi peningkatan sebesar 0,28% atau sebesar Rp614.085.500,00. Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 42  
Tanah Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
TANAH	221.213.141.638,00	220.599.056.138,00

Rincian aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 13 Daftar Aset Tanah.

Tabel 6.3. 43  
Mutasi Tanah

No	Uraian	Nilai
		Rp
Saldo Awal Tahun 2023		220.599.056.138,00
Bertambah :		614.085.500,00
-	Belanja Modal	464.000.000,00
-	Hibah	150.085.500,00
Berkurang :		-
Saldo Akhir Tahun 2023		221.213.141.638,00

- Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp614.085.500,00 berasal dari:
  1. Realisasi belanja modal tanah dari mekanisme SP2D sebesar Rp 464.000.000,00
  2. Hibah 5 (lima) bidang tanah senilai Rp150.085.500,00 dari Masyarakat untuk bangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang tersebar di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Nuangan, Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Motongkad, Kecamatan Mooat dan Kecamatan Kotabunan.

Penjelasan Tambahan Terkait Pengelolaan Aset Tetap Tanah

1. Atas penatausahaan dan pengelolaan aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 333 bidang tanah senilai Rp221.213.141.638,00.
2. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki 156 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan dan secara berkala berkesinambungan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait progres atas proses penerbitan sertifikat kepemilikan bidang tanah lainnya.

3. pada tahun 2023 terdapat pengadaan tanah dinas pendidikan pada sd motongkad namun masih memiliki sisa Luasan sebesar 135,055 M<sup>2</sup> yang sudah dikuasai pemerintah daerah tapi belum dilakukan pemindahan hak

6.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin adalah mesin – mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai dan digunakan untuk menunjang aktivitas operasional pemerintah daerah.

Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp321.031.551.189,70 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Peralatan Dan Mesin di Tahun 2022 sebesar Rp309.256.778.883,70 terjadi peningkatan sebesar 3,81% atau sebesar Rp11.774.272.306,00 Nilai aset tetap peralatan mesin Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 44  
Peralatan dan Mesin  
Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
PERALATAN DAN MESIN	321.031.551.189,70	309.256.778.883,70

Rincian aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 14.

Tabel 6.3. 45  
Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai
		Rp
Saldo Awal Tahun 2023		309.256.778.883,70
Bertambah :		13.752.306.102,00
-	Belanja Modal	9.966.164.186,00
-	Belanja BOS	1.507.722.577,00



No	Uraian	Nilai
		Rp
-	Belanja Kapitasi (JKN)	105.314.700,00
-	Hibah	1.945.038.090,00
-	Reklas dari KIB Lain	211.922.549,00
-	Reklas dari Barjas	16.144.000,00
Berkurang :		1.978.033.796,00
-	Hapus	1.202.351.468,00
-	Reklas ke KIB Lain	7.148.500,00
-	Reklas ke Barjas	222.398.500,00
-	Ekstrakom	546.135.328,00
Saldo Akhir Tahun 2023		321.031.051.189,70

Penambahan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp15.928.324.302,00 berasal dari:

- 1) Realisasi belanja modal peralatan mesin dari mekanisme SP2D sebesar Rp 9.966.164.186,00;
- 2) Realisasi belanja modal peralatan mesin dari mekanisme SP2B dari belanja BOS sebesar Rp1.507.722.577,00. Nilai ini sudah termasuk dalam nilai realisasi belanja modal pada laporan realisasi anggaran (LRA);
- 3) Realisasi belanja kapitasi (JKN) sebesar Rp105.314.700,00. Nilai ini sudah termasuk dalam nilai realisasi belanja modal pada laporan realisasi anggaran (LRA).;
- 4) Hibah sebesar Rp. 1.945.038.090,00 berasal dari:
  - a) Hibah Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp22.330.100,00 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 88/D.III.5/PL.06/BAST-TORLIN/09/2019 Tanggal 3 September 2019 dan mobil sebesar Rp232.950.000,00 yang tertuang dalam Berita Acara Serah terima Barang antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 76/D.III.5/PL.06/BAST-MOLIN/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018;

- b) Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa bus sekolah sebesar Rp.498.380.110,00 yang tertuang dalam Berita Acara Serah terima Hibah Berupa 1 (Satu) Unit Bus Sekolah Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian Perhubungan RI kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor PL.301/07/1.A/AJ/VIII/2023 Tanggal 2 Agustus 2023;
  - c) Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa alat Kesehatan dengan total nilai sebesar Rp1.112.600.000,00 yang tertuang dalam tiga Berita Acara Serah Terima, antara lain Berita Acara Serah terima Penyediaan Pulse Oximeter Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 tanggal 15 Desember 2023, Berita Acara Serah Terima Penyediaan Alat Ultrasonografi (USG 2D) Nomor BJ.01.04/PPK4.1/204/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dan Berita Acara Serah Terima Penyediaan Antropometri Kit Nomor BJ.01.04/PPK4.1/376/2023 tanggal 2 Oktober 2023;
  - d) Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang sebagiannya dibelanjakan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp 78.777.880,00
- 5) Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp211.922.549,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Reklasifikasi sebesar Rp209.022.549,00 berupa reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggarkan pada belanja ruang Unit Kesehatan Siswa, ruang laboratorium, belanja ruang guru dan ruang kepala sekolah dan belanja ruang praktik;
  - b) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.900.000,00.
- 6) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa (BOS) sebesar Rp16.644.000,00;
- Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.978.033.796,00 akibat dari:
- 1) Penghapusan sebesar Rp1.202.351.468,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Dua yang dipindahtanggankan dengan Mekanisme Hibah Tahun 2023 sebesar Rp578.450.000,00. Rincian penghapusan aset dapat dilihat pada Lampiran 15;
- b) Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2023 sebesar Rp623.901.468,00. Rincian penghapusan aset dapat dilihat pada Lampiran 15;
- 2) Reklasifikasi ke KIB lain berupa Reklasifikasi ke aset tetap lainnya belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.7.148.500,00.
- 3) Reklasifikasi ke barang dan jasa sebesar Rp 222.398.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Reklasifikasi ke beban alat dapur pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp 146.358.500,00;
  - b) Reklasifikasi ke beban komputer unit lainnya dan peralatan komputer lainnya pada RSUD Boltim sebesar Rp75.540.000,00;
  - c) Reklasifikasi ke beban barang dan jasa BOS pada SDN 1 Bongkudai Baru Utara sebesar Rp500.000,00.
- 4) Belanja peralatan mesin dengan nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp546.135.328,00;

#### 6.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan adalah properti yang dimiliki pemerintah daerah yang mencakup seluruh Gedung dan bangunan yang digunakan untuk tujuan pelayanan publik. Properti tersebut dapat berupa Gedung – Gedung pemerintah seperti Gedung kantor bupati, kantor dinas – dinas pemerintah daerah, atau bangunan lainnya seperti sekolah, rumah sakit, atau stasiun pengolahan air.

Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp466.901.817.645,73 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Gedung Dan Bangunan di Tahun 2022 sebesar Rp448.316.354.484,89, terjadi peningkatan sebesar 4,06% atau sebesar Rp 18.200.783.824. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.3. 46  
Gedung dan Bangunan  
Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
GEDUNG DAN BANGUNAN	466.517.138.308,89	448.316.354.484,89

Rincian aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 16.

Tabel 6.3. 47  
Mutasi Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	Nilai
		Rp
Saldo Awal Tahun 2023		448.316.354.484,89
Bertambah :		21.146.990.727,00
-	Belanja Modal	12.875.615.513,00
-	Hutang Retensi	77.509.916,00
-	Reklas dari KIB Lain	6.405.340.518,00
-	Reklas dari Barjas	1.788.524.780,00
Berkurang :		2.946.206.903,00
-	Hapus	269.621.000,00
-	Reklas ke KIB Lain	2.242.472.549,00
-	Realisasi Retensi	18.930.663,00
-	Lain - Lain Berkurang	415.182.691,00
Saldo Akhir Tahun 2023		466.517.138.308,89

- Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp21.146.990.726,84 berasal dari:
- 1) Realisasi belanja modal gedung dan bangunan dari mekanisme SP2D sebesar Rp12.875.615.513,00;
  - 2) Reklasifikasi dari KIB lain yaitu reklasifikasi dari KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang sebesar Rp6.405.340.518,00;

- 3) Reklasifikasi dari barang dan jasa sebesar Rp1.788.524.780,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Belanja Jasa Tenaga Ahli pada RSUD Boltim sebesar Rp 84.559.800,00;
  - b) Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp99.611.400,00;
  - c) Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 79.365.000,00;
  - d) Belanja pemeliharaan dan rehabilitasi gedung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.524.988.580,00.
- 4) Utang retensi yang akan dibayarkan di Tahun 2023 sebesar Rp77.509.916,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pembangunan Tugu Batas Wilayah Administrasi (Tahap II) pada Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang sebesar Rp32.799.341,00;
  - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Nuangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.484.923,00;
  - c) Rehabilitasi Ruang Kelas (3 Ruang) SD Negeri 1 Buyandi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 9.978.489,00;
  - d) Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri 1 Iyok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 9.992.753,00;
  - e) Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Negeri Lestari pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 8.232.082,00;
  - f) Pembangunan Ruang UKS TK Kristen Bangunan Wuwuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 7.022.328,00.
- Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.561.527.566,00 akibat dari:
  - 1) Penghapusan dengan mekanisme pemusnahan sebesar Rp 269.621.000,00 Poskesdes Loyow pada Dinas Kesehatan karena rusak berat dan selanjutnya dilakukan Pembangunan Gedung baru sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rincian penghapusan aset dapat dilihat pada Lampiran 15.
  - 2) Reklasifikasi ke KIB lainnya dengan rincian sebagai berikut Rp2.242.472.549,00:

- a) Reklasifikasi ke aset tetap peralatan mesin berupa belanja perabot pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 209.022.549,00 yang dianggarkan pada belanja ruang Unit Kesehatan Siswa, ruang laboratorium, belanja ruang guru dan ruang kepala sekolah dan belanja ruang praktik;
  - b) Reklasifikasi ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.033.450.000,00.
- 3) Realisasi Retensi sebesar Rp 18.930.663,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pekerjaan Penataan halaman Pasar Iyok pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp 13.944.083,00;
  - b) Rehabilitasi Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Kotabunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp.4.986.580,00;
- 4) Lain – lain berkurang sebesar Rp415.182.691,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Realisasi hutang Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri Atoga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 30.503.354,00
  - b) Realisasi hutang dalam Kontruksi Dalam Pengerjaan yang telah direklasifikasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp384.679.337,00

6.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.015.589.520.277,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan di Tahun 2022 sebesar Rp933.563.567.808,00, terjadi peningkatan sebesar 8,79% atau sebesar Rp82.025.952.469,00. Nilai Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 48  
Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Tahun 2023 - 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.015.589.520.277,00	933.563.567.808,00



Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 17.

Tabel 6.3. 49  
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai
		Rp
Saldo Awal Tahun 2023		933.563.567.808,00
Bertambah :		89.827.937.752,00
-	Belanja Modal	46.872.640.461,00
-	Hibah Masuk	25.286.396.400,00
-	Reklas dari KIB Lain	15.849.106.378,00
-	Reklas dari Barjas	1.819.794.513,00
Berkurang :		7.801.985.283,00
-	Reklas ke KIB Lain	6.799.718.022,00
-	Realisasi Retensi	6.054.290,00
-	Lain - Lain Berkurang	996.212.971,00
Saldo Akhir Tahun 2023		1.015.589.520.277,00

- Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp89.827.937.752,00 berasal dari:
  - 1) Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dari mekanisme SP2D sebesar Rp46.872.640.461,00
  - 2) Hibah sebesar Rp25.286.396.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Hibah IPA SPAM kapasitas sedang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp8.236.702.500,00 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 188.1/BA/DC/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang berlokasi di Kecamatan Modayag.
    - b) Hibah IPA SPAM kapasitas sedang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

sebesar Rp8.437.892.500,00 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 43.3/BA/DC/2022 Tanggal 2 Februari 2022 dan selanjutnya tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor 696/BA/DC/2023 yang berlokasi di Kecamatan Motongkad.

- c) Hibah IPA SPAM kapasitas sedang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp8.611.801.400,00 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor 696/BA/DC/2023 yang berlokasi di Kecamatan Kotabunan.
- 3) Reklasifikasi dari KIB lain berupa reklasifikasi dari KDP pada Dinas PUPRPRKPP sebesar Rp 15.849.106.378,00
- 4) Reklasifikasi dari barang dan jasa sebesar Rp1.819.794.513,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp149.092.425,00
  - b) Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih pada Dinas Kesehatan sebesar Rp648.819.570,00
  - c) Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Alam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp833.108.983,00
  - d) Belanja Bangunan dermaga pada Dinas Pariwisata sebesar Rp188.773.535,00
- Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp7.801.985.283,00 akibat dari:
  - 1) Reklasifikasi ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.799.718.022,00
  - 2) Realisasi retensi atas pekerjaan talud dan bronjong pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang sebesar Rp 6.054.290,00

- 3) Lain – lain berkurang berupa realisasi hutang dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah direklasifikasi menjadi aset tetap jalan irigasi jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp996.212.971,00

6.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp 20.184.604.769,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya di Tahun 2022 sebesar Rp 20.065.971.269,00 terjadi peningkatan sebesar 1,9% atau sebesar Rp118.633.500,00 Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 50  
Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
ASET TETAP LAINNYA	20.184.604.769,00	20.065.971.269,00

Rincian aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 18.

Tabel 6.3. 51  
Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai
		Rp
Saldo Awal Tahun 2023		20.065.971.269,00
Bertambah :		893.854.825,00
-	Belanja Modal	171.212.978,00
-	Belanja BOS	698.601.947,00
-	Hibah	10.555.200,00
-	Reklas dari KIB Lain	7.148.500,00
-	Reklas dari Barjas	6.336.200,00



No	Uraian	Nilai
		Rp
Berkurang :		778.961.325,00
-	Hapus	303.000,00
-	Reklas ke KIB Lain	2.900.000,00
-	Ekstrakom	775.758.325,00
Saldo Akhir Tahun 2023		20.180.864.769,00

- Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp893.854.825,00 berasal dari:
  - 1) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya dari mekanisme SP2D sebesar Rp171.212.978,00
  - 2) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya dari mekanisme SP2B dari belanja BOS sebesar Rp 698.601.947,00 Nilai ini sudah termasuk dalam nilai realisasi belanja modal pada laporan realisasi anggaran (LRA)
  - 3) Reklasifikasi dari KIB lain berupa reklasifikasi dari peralatan mesin belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 7.148.500,00;
  - 4) Reklasifikasi dari barang jasa berupa Belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.336.200,00;
  - 5) Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang sebagiannya dibelanjakan pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.555.200,00
- Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp 885.928.049,00 akibat dari:
  - 1) Penghapusan buku umum pada Inspektorat daerah sebesar Rp 255.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rincian penghapusan aset dapat dilihat pada Lampiran 15.
  - 2) Reklasifikasi ke KIB lain berupa reklasifikasi ke peralatan dan mesin belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.900.000,00;
  - 3) Belanja aset tetap lainnya dengan nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp775.758.325,00;

- 4) Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp48.000,00 dan aset tetap lainnya yang nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp121.388.592,00 karena perbedaan kuantitas berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan.

6.3.1.3.6. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah mencakup aset yang sedang dalam proses pengerjaan/pembangunan namun dalam tanggal pelaporan keuangan belum selesai secara keseluruhan.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp 9.693.533.899,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan di Tahun 2022 sebesar Rp23.114.812.773,27, terjadi pengurangan sebesar 58,06% atau sebesar Rp13.421.278.874,27. Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 52  
Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	9.693.533.899,00	23.114.812.773,27

Rincian aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 19.

Tabel 6.3. 53  
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai
		Rp
Saldo Awal Tahun 2023		23.114.812.773,27
Bertambah :		8.833.168.022,00
-	Reklas dari KIB lain	8.833.168.022,00
Berkurang :		22.254.446.896,27
-	Reklas ke KIB lain	22.254.446.896,27
Saldo Akhir Tahun 2023		9.693.533.899,00

- Penambahan aset tetap KDP sebesar Rp8.833.168.022,00 berasal dari:
  - 1) KDP gedung dan bangunan sebesar Rp 2.033.450.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
  - 2) KDP jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 6.799.718.022,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Pengurangan aset tetap KDP sebesar Rp 22.254.446.896,27 akibat dari:
  - 1) Reklasifikasi ke Gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp 6.405.340.518
  - 2) Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp 15.849.106.378

Tabel 6.3. 54  
Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
		Rp	Rp
Konstruksi Dalam Pengerjaan		9.693.533.899,00	23.114.812.773,27
1	Konstruksi dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	2.660.402.840,00	7.032.293.357,84
2	Konstruksi dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.033.131.059,00	16.082.519.415,43

6.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan masa manfaat suatu aset tetap selain tanah. Sedangkan Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan atas aset-aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun-tahun anggaran sebelumnya sampai dengan tanggal neraca. Penghitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) yang sudah tertanam (*by system*) pada aplikasi Simda-BMD. Nilai Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.238.120.394.928,70. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai di Tahun 2023 sebesar



Rp1.126.248.866.507,70, terjadi peningkatan sebesar 9,93% atau sebesar Rp 111.871.528.421,00. Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 55  
Akumulasi Penyusutan  
Tahu 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.239.809.013.466,70)	(1.127.600.632.946,70)

Rincian akumulasi penyusutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 20.

Tabel 6.3. 56  
Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan		(1.239.809.013.466,70)	(1.127.600.632.946,70)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(277.229.832.064,70)	(251.975.580.046,70)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(157.705.085.726,00)	(134.944.581.656,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(804.861.301.298,00)	(740.667.676.866,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(12.794.378,00)	(12.794.378,00)

6.3.1.4. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset-aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap dana cadangan. Aset Lainnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.688.780.785,00. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya di Tahun 2021 sebesar Rp1.931.997.481,00, terjadi peningkatan sebesar 142,69% atau sebesar Rp2.756.783.304,00. Nilai Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 57

Aset Lainnya Tahun 2023 – 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
ASET LAINNYA	847.707.739,00	4.688.780.785,00

Dari tabel diatas Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian, berikut rinciannya:

Tabel 6.3. 58

Rincian Aset Lainnya

Tahun 2023 – 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
ASET LAINNYA		847.707.739,00	4.688.780.785,00
1	Tagihan Jangka Panjang	89.878.800,00	79.650.054,00
2	Aset Tidak Berwujud	3.973.515.000,00	3.973.515.000,00
3	Aset Lain-lain	3.044.236.010,00	2.906.610.283,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.905.710.833,00)	(3.020.329.016,00)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.354.211.238,00)	(2.014.831.286,00)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.764.165.750,00